

**EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN PENGEMIS
DAN GELANDANGAN PADA PROGRAM *SKILL
DEVELOPMENT CENTER* DI DINAS SOSIAL
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH :

WINARSIH ANALISIS ZAI

188520092



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)17/7/25

**EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN PENGEMIS DAN
GELANDANGAN PADA PROGRAM *SKILL DEVELOPMENT*
CENTER DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH:

WINARSIH ANALISIS ZAI

188520092



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : WINARSIH ANALISIS ZAI
NPM : 188520092
JUDUL : EVALUASI KEHIJAKAN PENANGANAN PENGEMIS
DAN GELANDANGAN PADA PROGRAM SKILL
DEVELOPMENT CENTER DI DINAS SOSIAL KOTA
MEDAN

Disetujui oleh

Pembimbing I



Dr. Novita Wulandari, S.ST.,M.Si

Pembimbing II



Khairunnisah Lubis, S.Sos.,M.I.POL

Mengetahui:

Dekan



Dr. Waid Musthafa, S.S.Sos.M.IP

Kepala Prodi Administrasi Publik



Dr.Drs. Indra Muda, M.AP

Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINARSIH ANALISIS ZAI

NPM : 188520092

Tempat, Tanggal Lahir : Sisobahil, 06 Agustus 2000

Alamat : Jl. Taud No.120, Sidorejo, Medan Tembung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengemis dan Gelandangan pada program *Skill Development Center* di Dinas Sosial Kota Medan” adalah hasil pekerjaan saya, dan seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya termasuk pencabutan gelar Sarjana Administrasi Publik yang nanti saya dapatkan.

Medan, 15 Februari 2025



WINARSIH ANALISIS ZAI
188520092

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WINARSIH ANALISIS ZAI
NPM : 188520092
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive-Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengemis dan Gelandangan pada Program *Skill Development Center* di Dinas Sosial Kota Medan". Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi/tesis saya, selama mencantumkan nama saya sebagai pemilik/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : Februari 2025

Yang menyatakan



WINARSIH ANALISIS ZAI
188520092

Document Accepted 17/7/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

Permasalahan pengemis dan gelandangan menjadi isu kesejahteraan sosial yang dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Evaluasi kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan pada program *skill development center* di Dinas Sosial Kota Medan, serta faktor penghambat pelaksanaan program tersebut. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jumlah informan Sembilan orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik Analisis data menggunakan *Interaktif Miles Government* yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian di antaranya: Evaluasi kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan sudah cukup efektif, di lihat dari sisi *Input* dari Sumber Daya Manusia sudah cukup memenuhi dalam penanganan, sarana dan prasarana sudah cukup lengkap yang digunakan saat melakukan penanganan, sosialisasi dilakukan dalam bentuk pendekatan dan pemberitahuan secara langsung di lapangan, dari sisi proses dari kejelasan mekanisme dilakukan sudah jelas dan terlaksana dengan baik, Kepastian dalam melakukan penanganan sudah dilakukan sudah efektif yaitu melakukan patroli setiap hari, dan Penertiban 15 kali dalam sebulan. Dari sisi *Output*, kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan kebijakan sudah sangat sesuai dimana kebijakan dilaksanakan untuk menciptakan Kota Medan yang bersih. Ketepatan sasaran sudah tepat dimana sasaran dari kebijakan ini yaitu para pengemis dan gelandangan, kelompok yang terlibat seperti Satuan polisi pamong praja kota Medan, Polisis Resort kota Besar Medan, Dinas Sosial Kota Medan. Dari sisi *Outcome* adanya perubahan dimana sasaran kebijakan dibekali pembinaan keterampilan untuk mengelola lahan pertanian. Adapun faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program tersebut yaitu : masih belum tersedianya rumah perlindungan sosial dan mental para sasaran kebijakan.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Penanganan Pengemis dan Gelandangan, *Skill Development Center*

ABSTRACT

The problem of beggars and homeless people is a social welfare issue which is emphasized in Law Number 40 of 2004 and Law Number 11 of 2009. This study aims to find out and describe the evaluation of policies for handling beggars and homeless people in the skill development center program at the City Social Service Medan. As well as factors inhibiting the implementation of the program. Researchers used descriptive qualitative research with nine informants. Data collection techniques used by researchers are observation, interviews, and documentation. While the data analysis technique uses Interactive Miles Government which consists of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

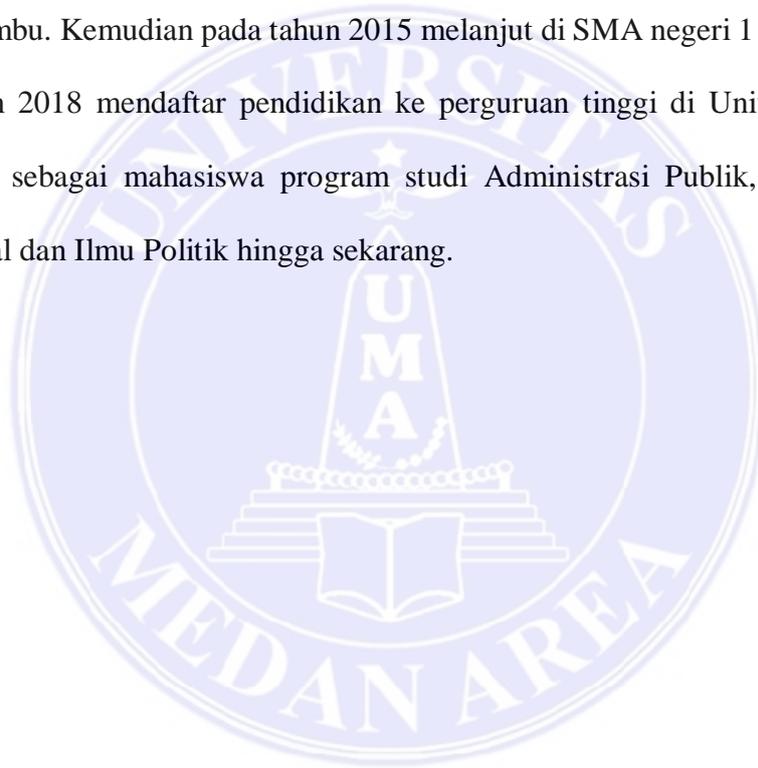
The results of the research include: Evaluation of the policy for handling beggars and homeless people is quite effective, in terms of input from Human Resources it is sufficient in handling, the facilities and infrastructure are sufficiently complete to be used when carrying out handling, socialization is carried out in the form of direct approaches and notifications in the field, in terms of the process, the clarity of the mechanism is clear and well implemented, certainty in carrying out handling has been carried out effectively, namely carrying out daily patrols, and controlling 15 times a month. From the output side, the suitability of the implementation with the policy objectives is very appropriate where the policy is implemented to create a clean city of Medan, the accuracy of the target is right where the targets of this policy are beggars and homeless people, groups involved such as the Medan Civil Service Police Unit, City Resort Police Medan Besar, Medan City Social Service. From the Outcome side, there has been a change whereby the policy target is equipped with skill development to manage agricultural land. The factors that hinder the implementation of the program are: the absence of social and mental shelters for policy targets.

Keywords : Policy Evaluation, Treatment of Beggars and Homeless People, Skill Development Center.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Winarsih Analisis Zai, anak dari Eliudi Zai dan Meriasa Gulo. Lahir pada tanggal 06 Agustus 2000 di Desa Sisobahili, dua puluh tiga tahun yang lalu. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara.

penulis bersekolah di Sekolah Dasar negeri 071172 Fabaliwa pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sirombu. Kemudian pada tahun 2015 melanjut di SMA negeri 1 Sirombu . Pada tahun 2018 mendaftar pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Medan Area sebagai mahasiswa program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik hingga sekarang.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu yang berjudul “**Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengemis dan Gelandangan pada Program *Skill Development Center* di Dinas Kota Medan**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata satu (S1) Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang berpartisipasi. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. M. Erwin Siregar, MBA, selaku Ketua Yayasan Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak DR. Walid Musthafa, S.S.Sos,M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST.M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan memberikan waktu selama penyusunan skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan tepat waktu.
5. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos.M.I.Pol selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan memberikan waktu selama penyusunan skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan tepat waktu.
6. Bapak Hikmawan Syahputra, S.IP.MA selaku Sekretaris Skripsi Penulis

7. Bapak Dr.Drs. Indra Muda, M.AP Selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Medan Area.
8. Kedua Orang Tua penulis, Ayah Eliudi Zai dan Ibu Meriasa Gulo yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik motivasi dan materi dari awal masuk perkuliahan sampai menyelesaikan studi.
9. Saudara penulis, Elisafat Zai, Sadarhati M. Gulo, Nelfin Zai, Ites Hulu, Agustrianto Zai, Margaretha P. Zai, Marthalenta Y. Zai dan keponakan terkasih Walmond Hulu, Caitlin Hulu, Glen Zai, Marcello Hulu dan Keysa Zai yang selalu memberikan semangat dan dukungan pada penulis.
10. Kepada Boy Grup BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook yang memberikan semangat dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum memenuhi harapan pembaca karena keterbatasan kemampuan penulis, tetapi penulis ingin terus belajar supaya lebih baik lagi. Maka dari itu penulis sangat berharap masukan dan saran yang membangun sehingga penuisan karya ilmiah selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Medan, Februari 2025

Penulis

Winarsih Analisis Zai

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Evaluasi Kebijakan	8
2.1.1 Definisi Evaluasi Kebijakan.....	8
2.1.2 Model Evaluasi Kebijakan	9
2.1.2.1 Indikator <i>Input</i>	11
2.1.2.2 Indikator Proses.....	13
2.1.2.3 Indikator <i>Output</i>	16
2.1.2.4 Indikator <i>Outcome</i>	18
2.1.3 Tahap Evaluasi Kebijakan.....	20
2.1.4 Faktor-faktor kegagalan dalam Kebijakan	20
2.2 Pengemis dan Gelandangan.....	22
2.2.1 Definisi Pengemis.....	22
2.2.2 Definisi Gelandangan	24
2.2.3 Kriteria Pengemis dan Gelandangan.....	25
2.2.4 Karakteristik Pengemis dan Gelandangan.....	27
2.3 Program <i>Skill Development Center</i>	29
2.4 Kerangka Berpikir.....	31
2.5 Penelitian terdahulu	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Fokus Penelitian	40
3.3 Informan Penelitian.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5 Teknik Analisis Data.....	46
3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian	48
3.6.1 Lokasi Penelitian	48
3.6.2 Jadwal Penelitian	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	50
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Medan	50
4.1.2 Sejarah Perkembangan Dinas Sosial Kota Medan.....	52
4.1.3 Visi, Misi, Dan Tujuan Dinas Sosial Kota Medan	52
4.2 Hasil Penelitian.....	54
4.3 Pembahasan	60
4.3.1 Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengemis dan Gelandangan Pada Program <i>Skill Development Center</i> di Dinas Sosial Kota Medan	60
4.3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Penanganan Pengemis dan gelandangan Pada Program <i>Skill Development Center</i> Di Dinas Sosial Kota Medan ...	83
BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN 1. PEDOMAN OBSERVASI.....	92
2. PEDOMAN WAWANCARA.....	94
3. SURAT IZIN PENELITIAN	95
4. HASIL OBSERVASI	96
5. HASIL WAWANCARA	98
6. DOKUMENTASI.....	120

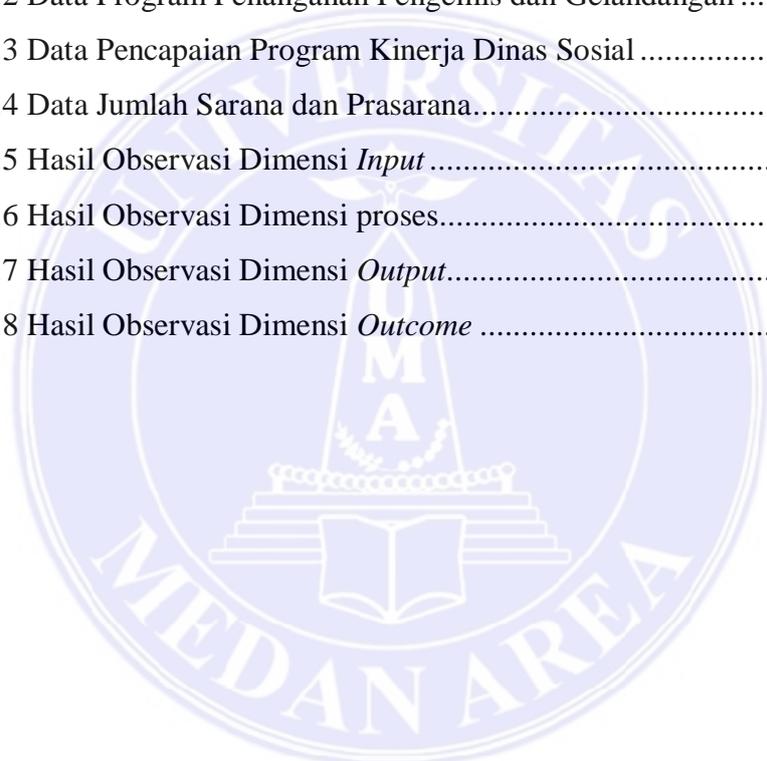
DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran	32
Bagan 3.1 Model Teknik Analisis Data	48
Bagan 4.1 Struktur Dinas Sosial Kota Medan.....	51



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengemis dan Gelandangan	3
Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi Menurut Dunn(2003:610).....	10
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian	42
Tabel 3.2 Rincian Jadwal Penelitian.....	49
Tabel 4.1 Data Jumlah Pengemis dan Gelandangan.....	55
Tabel 4.2 Data Program Penanganan Pengemis dan Gelandangan	57
Tabel 4.3 Data Pencapaian Program Kinerja Dinas Sosial	58
Tabel 4.4 Data Jumlah Sarana dan Prasarana.....	64
Tabel 4.5 Hasil Observasi Dimensi <i>Input</i>	67
Tabel 4.6 Hasil Observasi Dimensi proses.....	74
Tabel 4.7 Hasil Observasi Dimensi <i>Output</i>	80
Tabel 4.8 Hasil Observasi Dimensi <i>Outcome</i>	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengemis dan gelandangan menjadi salah satu permasalahan yang tidak mudah untuk diselesaikan dinegara-negara berkembang khususnya seperti di Indonesia. Permasalahan pengemis dan gelandangan merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama didaerah perkotaan. Peningkatan jumlah keluarga miskin dan angka putus sekolah di berbagai tingkat pendidikan, yaitu seperti menurunnya kesempatan kerja dan maraknya konflik sosial dan politik yang muncul diberbagai daerah.

Keberadaan pengemis dan gelandangan ini cenderung membahayakan dirinya sendiri dan orang lain dikarenakan mengganggu ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan. Pengemis, gelandangan, dan orang terlantar yang termasuk dalam penyandang masalah kesejahteraan atau disebut PMKS merupakan kelompok masyarakat, perorangan, keluarga yang dikarenakan suatu kesulitan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya yaitu kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.(Jogjaprov. *Jenis-jenis PMKS-Dinas Sosial*. Diakses Pada tanggal 6 Oktober 2022).

Pengemis dan gelandangan biasanya kita lihat ditempat-tempat umum, maupun di lampu lalu lintas, mereka akan medatangi para pengendara yang sedang menunggu jalannya sesuai dengan peraturan lalu lintas dengan membawa

kantong plastik, botol aqua cup yang digunakan untuk tempat uang pemberian orang lain. Kegiatan mengemis tidak memandang umur, seperti yang kita lihat bahwa masih ada anak-anak dibawah umur yang mengemis yang dikendalikan oleh pemimpin mereka dimana hasilnya akan mereka bagi dua.

Tindakan pengemis sangat meresahkan masyarakat, dikarenakan para pengemis akan mendatangi setiap orang yang melintasi tempat mereka dan tidak akan berhenti sampai mereka diberi uang, terkadang pun merek akan memaksa dengan cara marah dan memukul orang lain yang tidak memberi uang. Kebijakan-kebijakan juga merupakan faktor dari masalah pengemis dan gelandangan. (Semarangkota. *Sudah Tidak mempan ditegur, 19 Orang pengemis, gelandangan dan anak jalanan terjaring penertiban*. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga terkadang dianggap tidak pro. Berkaitan dengan gelandangan dan pengemis ada banyak peraturan-peraturan dan kebijakan tentang ini, lebih berorientasi pada larangan-larangan pengemis ditempat umum,tapi bukan mengenai upaya dalam menangani pengemis dan gelandangan. Sama seperti kota besar lainnya, Medan sebagai kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia memiliki banyak permasalahan dalam kesejahteraan sosial. Apalagi selama pandemi, permasalahan sosial dalam masyarakat seperti penurunan pendapatan dan banyaknya pekerja yang dirumahkan, semakin menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Sosial Kota medan. Hal ini mengharuskan masyarakat mencari cara untuk menambah penghasilan. (Orbit digital. *Kadinsos Medan: Pengemis, manusia silver, anak jalanan berasal dari luar kota*. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022).

Pengaturan tentang pengemis dan gelandangan yang merupakan bagian dari fakir miskin dan anak terlantar secara umum yaitu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara”. Tidak tertinggal juga dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik asusila di Kota Medan, dengan peraturan ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Dinas Sosial sebagai dinas terkait untuk menertibkan keberadaan gelandangan dan pengemis.

Tabel 1.1 Data Perkembangan penyandang masalah sosial Kota Medan Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Gelandangan	Jumlah Pengemis	Jumlah Per Tahun
2018	97	179	276
2019	99	143	242
2020	200	172	372
2021	122	180	302
2022	120	114	234

Sumber : Dinas Sosial, 2023

Tabel 1.1 diatas dapat dikatakan bahwa jumlah pengemis dan gelandangan dapat dikatakan bahwa di Kota Medan dari tahun 2018-2020 belum stabil. Dinas Sosial Kota Medan pada tahun 2018 melakukan evaluasi kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan mendapat jumlah 97 gelandangan, 179 pengemis yang terjaring razia penanganan. Pada tahun 2019 pada hasil evaluasi yang dilakukan Dinas Sosial jumlah gelandangan meningkat dari jumlah sebelumnya ditahun 2018 yaitu 99 orang, sedangkan pengemis menurun jumlahnya menjadi 143 orang yang terjaring penanganan. Tahun 2020 jumlah peningkatan

gelandangan meningkat drastis menjadi 200 orang dan pengemis juga meningkat 172 orang yang terjaring, Setelah dilakukan evaluasi diketahui bahwa itu akibat dari penurunan perekonomian akibat covid-19 yang terjadi diseluruh wilayah, terkhusus Kota Medan.

Pemerintah Daerah Kota Medan dalam hal tersebut dalam mengupayakan perihal gelandangan dan pengemis ini sudah banyak dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya, namun fakta lapangan sangat bertolak belakang dengan upaya yang dilakukan sebelumnya, dimana saat ini pengemis jalanan dan gelandangan masih sangat mudah ditemui di tiap sudut Kota Medan. (RMOL SUMUT, *Pengemis masih banyak dilampu merah*. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2022).

Dinas sosial Kota Medan sebagai pelaksana peraturan memiliki peranan penting untuk mengevaluasi agar tercapainya tujuan dari peraturan tersebut. Tetapi, dalam pelaksanaan evaluasi yang dilakukan pihak Dinas Sosial Kota Medan belum menjawab permasalahan yang ada di lapangan, dalam artian evaluasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan bukan untuk perbaikan kebijakan larangan pengemis. Pemerintah Kota Medan membentuk forum pusat pengembangan keterampilan *Skill Development Center* melalui SK Nomor 563/25.K/VII/2021 periode 2021-2024 dengan tujuan menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan Skill (keterampilan) di Kota Medan. (Top Metro News. *DPRD Medan Pertanyakan realisasi Program SDC*. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2022). Di tahun 2021 terbentuklah sebuah program *Skill Development Center*.

Dinas Sosial melakukan pembinaan pengemis dan gelandangan melalui program tersebut supaya dapat mengurangi pengemis dan gelandangan karena tidak adanya keterampilan. Akan tetapi masih ada hambatan sehingga program yang dimaksud tidak bisa terlaksana dimana bisa dilihat masih banyak pengemis dan gelandangan yang mudah ditemui di setiap tempat. Menarik peneliti untuk meneliti terkait program ini guna mengetahui seberapa jauh program *Skill Development Center* ini telah terlaksana. Tujuan program ini ialah untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang dikhususkan pada pengemis dan gelandangan, memandirikan kehidupan pengemis dan gelandangan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, dirasa perlu untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan program yang telah dibentuk. Dengan dilakukannya evaluasi, akan diketahui capaian program *Skill Development Center* yang diterapkan Kota Medan, sehingga peneliti dalam penelitian ini mengangkat judul **Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengemis dan Gelandangan Program *Skill Development Center* di Dinas Sosial Kota Medan.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Banyaknya Pengemis dan gelandangan yang masih sangat mudah ditemui di setiap sudut kota medan.
2. Peningkatan pengemis dan gelandangan di Kota medan dari tahun 2018-2020 mengalami kenaikan drastis.
3. Diperlukannya Evaluasi kebijakan dalam penanganan pengemis dan gelandangan pada program *Skill Development Center*
4. Masih sulit ditemukan Pembinaan Pengemis dan gelandangan untuk meningkatkan kemampuan.
5. Fakta lapangan yang bertolak belakang dengan upaya penanganan yang dilakukan sebelumnya.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian sangat penting agar dapat terarah dalam masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Evaluasi kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan pada program *Skill Development Center* Dinas Sosial Kota Medan ?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan dalam penanganan pengemis dan gelandangan pada program *Skill Development Center* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Evaluasi Penanganan Pengemis dan Gelandangan program *Skill Development Center* Dinas Sosial Kota medan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa faktor penghambat pelaksanaan penanganan pengemis dan gelandangan terhadap program *Skill development center*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengemis dan Gelandangan di Kota Medan serta pemerintah dapat memaksimalkan usaha penanganan pengemis dan gelandangan menggunakan program pembinaan sumber daya manusia dalam menciptakan pelayanan publik yang baik di tengah masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan pengemis dan gelandangan pada program *Skill Development Center* sehingga pembinaan yang dilakukan dapat dimaksimalkan sebaik mungkin .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi Kebijakan

2.1.1 Definisi Evaluasi Kebijakan

Dye (dalam Winarno : 2013) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan sebuah Konsekuensi dari kebijakan Publik. Lanjut Winarno (2013) mengatakan bahwa kebijakan publik menjalani proses yang panjang dan rumit, kebijakan publik memiliki tahap-tahap berjalannya dan setiap akhir berjalannya kebijakan publik perlu adanya evaluasi.

Evaluasi kebijakan merupakan suatu bentuk atau langkah dalam pengukuran terhadap kinerja atau program yang sedang berjalan, dalam evaluasi segala aspek penting sangat diperlukan dalam proses perbaikan atau peningkatan suatu program agar terlihat lebih baik dan tepat sesuai dengan tujuan yang ada, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki kelemahan dan ditingkatkan lagi namun yang masih lemah harus didorong dengan mengembangkan kebijakan yang sudah dibuat.(Indra Muda : 2019:25)

Pendapat Anderson dalam Sulistio (2012:52) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan untuk menilai sejauh mana tujuan dicapai.

Nugroho (2014 : 706) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kinerja implementasi kebijakan publik. Evaluasi di laksanakan setelah kegiatan selesai dan untuk menilai kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2013:277) menjelaskan evaluasi dibedakan dalam dua tugas yang berbeda yaitu sebagai berikut :

“Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menjelaskan dampaknya.

Tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan kebijakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian terhadap implementasi kebijakan maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*Impact*) dari berjalannya suatu kebijakan, sehingga menentukan langkah yang akan diambil pada masa yang akan datang”.

Joko Pramono (2020 : 48) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap serangkaian tindakan yang telah direncanakan, diputuskan, dan dilakukan dimana tujuan dari evaluasi adalah untuk melihat sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk pertimbangan pelaksanaan kebijakan dimasa depan.

Pendapat para ahli diatas, dapat dinyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang enentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai. Diperlukan Evaluasi untuk menilai, mengukur serta membandingkan hasil pelaksanaan kebijakan, dimana hasil dari evaluasi sudah sesua atau belum dengan apa yang sudah direncanakan dengan efisien dan efektif. Dari hasil evaluasi dapat diperoleh informasi mengenai manfaat kebijakan dan sebagai pertimbangan perbaikan kebijakan kedepannya.

2.1.2 Model Evaluasi Kebijakan

Model evaluasi sering dikatakan sebagai model desain evaluasi yang dibuat para ahli atau pakar evaluasi yang biasanya dinamakan dengan pembuatnya atau tahap pembuatannya (Farida, 2008:4).

Kriteria evaluasi dibagi menjadi 6 (enam) bagian menurut Dunn (2003:429) yaitu :

“Pertama, Efektifitas merupakan suatu alternatif mencapai hasil akhir yang diharapkan dan tercapainya tujuan dari diadakannya tindakan. Kedua. Efisiensi untuk mencari tahu perbandingan antar *Input*, *Output*, dan *Outcome* dari suatu kebijakan atau program. Ketiga, Kecukupan untuk melihat sejauh mana kebijakan atau program dapat memecahkan permasalahan secara tepat melalui

kebijakan. Keempat, Perataan untuk mengetahui apakah biaya dan manfaat dari kebijakan atau program yang telah diterapkan terdistribusi secara merata kepada pihak yang terlibat. Kelima, Responsivitas untuk menilai hasil dari kebijakan atau program yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan nilai dari kelompok-kelompok yang terlibat dalam kebijakan. Keenam, Ketepatan untuk menilai apakah hasil atau tujuan dari kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat”.

Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi menurut William N. Dunn

No	Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
1	Efektifitas	Apakah mencapai hasil yang diharapkan ?	Pelayanan
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Biaya, Manfaat, rasio biaya manfaat
3	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah ?	Biaya tetap dan Efektifitas tetap
4	Perataan	Apakah biaya dan manfaat yang didistribusikan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda ?	Kriteria pareto, Kriteria Kaldor Hicks, Kriteria Rawls
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, nilai kelompok-kelompok tertentu ?	Konsistensi survey warga negara
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai ?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber : Dunn, (2003:610)

Nurcholis (2007:277) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian secara menyeluruh terhadap *Input*, *Proses*, *Output*, dan *Outcome* dari kebijakan pemerintah daerah. Pengukuran evaluasi kebijakan mengacu pada empat indikator yaitu :

1. Menurut ahli (dalam Nurcholis), Indikator *Input* (Masukan) adalah masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana dan bahan-bahan lainnya.

2. Menurut ahli (dalam Nurcholis), Indikator Proses adalah bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk nyata kepada masyarakat, meliputi kejelasan mekanisme, pelayanan, kepastian, penertiban, dan keefektifan dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Menurut ahli (dalam Nurcholis), Indikator *Output* (hasil) adalah hasil dari pelaksanaan kebijakan. Indikator ini meliputi tepat tidaknya sasaran yang di tuju dan kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Menurut ahli (dalam Nurcholis), Indikator *Outcome* (Dampak) adalah kebijakan yang dilaksanakan berdampak pada kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan meliputi perbaikan, peningkatan dan dampak positif yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Pendapat para ahli diatas dapat dikatakan bahwa evaluasi menggunakan beberapa model serta criteria yang sesuai dengan kriteria kebijakan yang akan di evaluasi. Jadi, model evaluasi membantu pengembangan implementasi, kebutuhan suatu program, pertanggung jawaban serta menambah pengetahuan bagi evaluator yang terlibat dalam evaluasi kebijakan.

2.1.2.1 Indikator *Input*

Stufflebeam & Coryn (2014 : 323) mengemukakan bahwa orientasi utama *input* adalah membantu menentukan pendekatan program dengan yang akan membuat perubahan yang akan diperlukan.

Nurcholis (2007:277) mengemukakan *Input* adalah masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, sosialisasi kebijakan.

1. Sumber Daya Manusia

Edy Sutrisno (2017:3) menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya. Semua potensi Sumber daya manusia tersebut berpotensi terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Aspek sumber daya manusia dalam kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan adalah pegawai atau implementor dalam pelaksanaan kebijakan penanganan. Kualitas Sumber daya manusia dalam hal ini sangat diperlukan saat melaksanakan kebijakan penanganan pengemis di kota Medan.

Sumber daya manusia adalah kemampuan dari daya fikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya (Benjamin, dkk. 2017:2).

Kesimpulan dari beberapa pendapat ahli diatas , sumber daya manusia adalah orang yang memiliki akal berpikir berkontribusi dalam program kebijakan serta pelaksana proses kebijakan yang mendukung strategi kebijakan dalam mencapai tujuan.

2. Sarana Prasarana

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1268) menjelaskan terkait dengan sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai untuk mencapai maksud dan tujuan. Prasarana merupakan segala sesuatu penunjang utama dalam proses usaha, pembangunan, dan proyek.

Rusdy dan Oda (2017: 19) juga menjelaskan bahwa sarana adalah alat yang secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Sedangkan, prasarana adalah alat yang tidak secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan seperti tempat atau lokasi.

Pendapat ahli diatas dapat dinyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan alat yang dibutuhkan dalam evaluasi kebijakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

3. Sosialisasi

Mardikanto dan Soebirto (2013:125) menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat, melalui sosialisasi akan membentuk peningkatan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program yang direncanakan.

Sosialisasi merupakan proses menyampaikan informasi pada sasaran kebijakan mengenai kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan di kota Medan. Menurut Herdiana (2018 : 19) menjelaskan tentang sosialisasi merupakan upaya penyebarluasan isi atau dengan maksud memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak dalam mensukseskan tujuan kebijakan.

Pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan penyampaian informasi tujuan kebijakan kepada masyarakat supaya ada pemahaman terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

2.1.2.2 Indikator Proses

Indikator proses memberikan umpan kepada pembuat keputusan sejauh mana mereka melaksanakan program sesuai waktu yang disepakati. Pembuat keputusan memberikan bimbingan staf agar dapat meningkatkan procedural dan anggaran rencana yang tepat.

Stufflebeam & Coryn, (2014 : 326) mengemukakan penjelasan tentang indikator proses yaitu kunci utama Indikator proses adalah penilaian proses. Lebih sering dari pada tidak, kegagalan anggota staff mendapatkan panduan

implementasi dan untuk mendokumentasikan kegiatan mereka dan pengeluaran akibat kegagalan disebabkan penugasan yang tidak sesuai.

Stufflebeam & Coryn (2014 : 326) juga menjelaskan bahwa indikator proses mencakup pemeriksaan berkelanjutan pada implementasi dan rencana, serta tujuan indikator proses untuk menilai sejauh mana peserta menerima dan melaksanakan keluar dari peran mereka.

Nurcholis (2007 :277) mengemukakan bahwa proses merupakan sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang meliputi kejelasan mekanisme, kepastian, penertiban dan keefektifan saat kebijakan dilaksanakan.

1. Kejelasan Mekanisme

Wibawa (dalam Anggara Sahya, 2018 :188) menjelaskan bahwa sebagai suatu proses tahap formulasi kebijakan memiliki komponen yang saling berhubungan, pertama yaitu tindakan, Komponen tindakan kebijakan merupakan tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang membentuk pola-pola tindakan bagi sistem kebijakan. Kedua yaitu aktor, orang atau pelaku yang terlibat dalam proses kebijakan serta menjadi sasaran dari kebijakan. Ketiga yaitu orientasi nilai, proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses dan analisis nilai kebijakan.

Pendapat diatas dapat disimpulkan kejelasan mekanisme sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan agar evaluasi kebijakan dapat berjalan, proses pelaksanaan kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan di kota Medan sangat perlu adanya formulasi kebijakan.

2. Kepastian

Jan Michiel Otto (2012 :122) menjelaskan bahwa kepastian sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu harus tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten, menyesuaikan perilaku terhadap aturan-aturan dan keputusan di laksanakan.

Kepastian dari pendapat diatas berhubungan dengan evaluasi kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan yang berkaitan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan kebijakan.

3. Penertiban

Penertiban hanya dilakukan oleh hukum yang berlaku, dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran itu bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas terhadap pelanggaran dengan ketentuan perundang-undangan dan juga berhak menerima sanksi dari peraturan perundang-undangan (Yahya Harapan, 2013 : 56).

Pendapat ahli diatas dapat disimpulkan penertiban dilakukan untuk ketaatan masyarakat terhadap peraturan dan merupakan aspek penting bagi Dinas Sosial Kota Medan terhadap pelanggaran hal-hal tertentu pada kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan.

4. Efektifitas

Mahsun (2006 : 182) efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektifitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian atau target kebijakan.

Pendapat Hani Handoko (2003:54) efektifitas adalah keahlian dalam memilih tujuan yang pasti dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Rosalina (2012:3) juga mengemukakan pendapat terkait dengan konsep efektifitas dapat mengevaluasi jalannya suatu organisasi yaitu, upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektifitas . Konsep ini salah satu faktor yang menentukan apakah perlu dilakukan perubahan.

Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas lebih mengarah pada tercapainya hasil yang diinginkan, efektifitas merupakan aspek penting di lihat dari pengimplementasia kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan.

2.1.2.3 Indikator Output

Nurcholis (2007:277) *Output* merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan. *Output* meliputi tepat tidaknya sasaran yang dituju, sasaran yang ditangani, dan kelompok yangterlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

1. Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan kebijakan

Kebijakan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan kebijakan, dalam hal ini kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan di kota Medan harus tepat sasaran.

Tahir (2011:40) menjelaskan bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan tujuan kebijakan publik yaitu, pertama, tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan- keputusan diskresinya secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat atau kerjakan. Keempat, bentuk kebijakan publik yang positif didasarkan pada ketentuan hukum. Kelima, tujuan kebijakan publik adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan pemerintah.

2. Ketepatan Sasaran

Nugroho (2011 : 650) mengemukakan pendapat terkait ketepatan sasaran Ketepatan sasaran berkenaan dengan tiga hal, yaitu :

“pertama. apakah sasaran sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpah tindih dengan kebijakan lain, Kedua , apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target dan kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

Dapat disimpulkan dari pendapat mengenai ketetapan sasaran, pengimplementasian kebijakan harus meninjau sasaran yang ditangani apakah sesuai dengan tujuan atau tidak.

3. Kelompok yang terlibat

Definisi kelompok menurut McDavid dan Harari (dalam Syamsul, 2015 : 22) kelompok adalah suatu sistem yang diorganisasikan pada dua orang atau lebih yang dihubungkan satu dengan lainnya tempat sistem tersebut menunjukkan fungsi yang sama, memiliki sekumpulan standar peran dalam berhubungan dengan anggotanyadan memiliki norma yang mengatur fungsi kelompok dan anggotanya.

Winarno (2013 : 123) juga menjelaskan bahwa kelompok yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dibagi dalam dua kelompok yaitu :

“Para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi.

Kelompok pemeran serta resmi adalah agen-agen pemerintah

(Birokrasi), Presiden (Eksekutif), Legislatif dan Yudikatif. Para pemeran tidak resmi meliputi kelompok kepentingan, partai politik, warga negara individu”.

Pendapat ahli tentang kelompok yang terlibat, dapat disimpulkan bahwa kelompok yang terlibat merupakan aspek penting dalam keberhasilan kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan di kota Medan.

2.1.2.4 Indikator *Outcome*

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2009: 31), menjelaskan bahwa *outcome* digunakan untuk mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai dilaksanakan.

Taufiqurokhman (2014: 6), menjelaskan terkait *outcome* adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Nurcholis (2007: 277), *outcome* mengarah kepada apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, meliputi perubahan atau perbaikan, peningkatan, dan dampak positif terhadap implementor yang terlibat di dalamnya.

1. Perubahan kelompok Sasaran

Abdul Syani (2011: 204), menjelaskan terkait perubahan kelompok sasaran yaitu perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan ataupun justru suatu kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial,

kekuasaan, tanggung jawab, kepemimpinan dan sebagainya. Dalam masyarakat maju atau pada masyarakat berkembang, perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan selalu berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi.

Pendapat ahli diatas dapat di simpulkan bahwa perubahan kelompok sasaran hakikaatnya dalam kehidupan mengalami perubahan dalam hasil pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan tujuan kebijakan apakah berdampak positif atau dampak negatif.

2. Peningkatan Pelaksanaan

Peningkatan pelaksanaan sangat berdampak pada keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan di kota Medan.

Abdullah & Ali (2017 : 4) menjelaskan tentang peningkatan pelaksanaan kebijakan yaitu proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melkasankan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melinkan juga menyangkut jaringan pada kekutan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perilaku dari pada pihak yang terlibat.

Pendapat ahli mengenai peningkatan pelaksanaan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pelaksanaan merupakan tahapan aktivitas program yang akan mempengaruhi hasil akhir dari suatu kebijakan.

2.1.3 Tahapan Evaluasi Kebijakan

Edward A. Suchman yang dikutip Winarno (dalam Hayat, 2018 : 43-44)

menjelaskan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi;
2. Analisis terhadap masalah;
3. Deskripsi dan standardisasi kegiatan;
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi;
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lainnya;

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal. Langkah-langkah tersebut dibuat agar suatu evaluasi dapat efektif dengan berjalan secara sistematis.

2.1.4 Faktor-faktor Kegagalan Evaluasi Kebijakan

Kebijakan atau program dapat gagal memperoleh dampak yang diharapkan meskipun proses implementasi berhasil mewujudkan *output* sebagai mana yang dituntut oleh program tersebut, namun gagal mencapai *outcomes*nya; apalagi jika keduanya gagal untuk didapatkan.

Anderson (dalam Sahya Anggara, 2018 : 283) menjelaskan faktor- faktor penyebab kegagalan dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Sumber daya yang tidak memadai.
2. Cara implementasi yang tidak tepat (misalnya, pilihan-pilihan tindakan yang kontra produktif, seperti studi banding atau membeli mobil bagi pejabat, yang memakan banyak biaya dengan tujuan meningkatkan kapasitas layanan).
3. Masalah publik sering disebabkan banyak faktor, tetapi kebijakan yang dibuat hanya mengatasi satu faktor.
4. Cara menanggapi kebijakan yang dapat mengurangi dampak yang diinginkan (misalnya, karena takut dianggap melanggar prosedur, *implementers* bertindak sesuai dengan *textbook* walaupun situasinya mungkin berbeda).

5. Tujuan-tujuan kebijakan tidak sebanding, bahkan bertentangan satu sama lain.
6. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya.
7. Banyak masalah publik yang tidak dapat diselesaikan.
8. Timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindakan.
9. Sifat dari masalah yang akan dipecahkan.

2.2 Pengemis dan Gelandangan

2.2.1 Definisi Pengemis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk menharapkan belas kasihan dari orang lain.

Definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengemis,“ menurut KBBI, berasal dari „emis“ dan punya dua pengertian: meminta-minta sedekah dan meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan. Sedangkan Pengemis adalah orang yang meminta-minta”.

Dimas (2013 : 1) mengemukakan bahwa pengemis merupakan sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta minta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan kerja yang sempit. Secara garis besar pengemis dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-meminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapakan belas kasihan orang lain.

Kementerian Sosial R.I menjelaskan Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Muthalib dan Sudjarwo (dalam Ali Yafie, 1986 : 3) memberikan tiga gambaran umum pengemis, yaitu:

1. Sekelompok orang miskin atau orang yang dimiskinkan oleh masyarakat,
2. Orang yang disingkirkan dari khalayak ramai, dan
3. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dari kemiskinan

Anggriana & Dewi (2016: 35), menjelaskan secara umum ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pengemis, yaitu:

1. Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluargasecara layak.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
3. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.
4. Faktor sosial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah. Terdapat beberapa faktor sosial budaya yang menjadikan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, yaitu: a). Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta. b). Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai

gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan. c). Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian. (Anggriana & Dewi, 2016: 35)

Dampak yang ditimbulkan akibat adanya pengemis menurut Anggriana & Dewi (2016: 37), yaitu:

1. Masalah lingkungan (tata ruang), pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti: taman taman, bawah jembatan dan pingiran kali.
2. Masalah kependudukan, pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan jalan dan tempat umum, kebanyakan tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat di kelurahan (RT/RW) setempat dan sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
3. Masalah keamanan dan ketertiban, maraknya pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial serta mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
4. Masalah kriminalitas, faktor penyebab dari kriminalitas ini dilakukan oleh para pengemis di tempat keramaian mulai dari pencurian, kekerasan hingga sampai pelecehan seksual ini kerap sekali terjadi.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

2.2.2 Definisi Gelandangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.

Gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat tinggal yang tetap, serta tidak mempunyai cara hidup tertentu yang berbeda dari cara hidup orang kebanyakan. Humaidi menyatakan bahwa gelandangan berasal dari kata gelandang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana, dan umumnya hidup sebatang kara (Bryan Novedion, 2016 : 16).

Departemen R.I mendefinisikan gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Twikromo Argo (1999 : 6) mengemukakan bahwa gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat tinggalnya, pekerjaannya dan arah tujuan kegiatannya. Semakin banyaknya gelandangan merupakan contoh yang ada saat ini bahwa kemiskinan adalah faktor utama paling berpengaruh dan mendasari kenapa masalah sosial ini terjadi, apalagi fenomena sosial ini banyak kita temukan di perkotaan.

Pemaparan mengenai gelandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa gelandangan adalah orang-orang yang tidak menentu tempat tinggalnya, dan hidup mengembara di tempat-tempat umum.

2.2.3 Kriteria Pengemis dan Gelandangan

Dimas (2016 : 1) menjelaskan Kriteria dari Pengemis yaitu :

1. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 11-59 tahun.
2. Meminta-minta dirumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan ayat-ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu.
4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaaur dengan penduduk pada umumnya.

Trisularni, *dkk* (2009:8-10) mengemukakan kriteria dari pengemis yaitu

:

1. Berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang berumur 18-59 tahun.
2. Meminta-minta di rumah penduduk, pertokoan, tempat ibadah, persimpangan jalan, dan tempat umum lainnya.
3. Bertingkah laku tertentu untuk mendapatkan belas kasihan orang.
4. Biasanya memiliki tempat tinggal tertentu atau tetap dan berbau dengan penduduk pada umumnya.

Sebagai seorang pengemis memiliki cirri-ciri khusus dalam berpenampilan, cirri-ciri pengemis menurut Trisularni, *dkk* (2009: 8-10) yaitu :

1. Mata pencarian tergantung pada belas kasihan orang lain.
2. Berpakian kumuh, compang camping, dan tidak wajar.
3. Meminta-minta di tempat umum.
4. Melakukan berbagai cara untuk mendapatkan perhatian dan akhirnya mendapat uang dari orang lain.

Gelandangan mempunyai kriteria Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 sebagai berikut :

- a. Tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. Tidak ada tempat tinggal yang tetap
- c. Tidak memiliki penghasilan

Dirjen Rehabilitasi mendefinisikan kriteria gelandangan sebagai berikut :

- 1) Usia 18 tahun ke atas, tinggal di sebarang tempat, hidup mengembara atau di tempat-tempat umum.

- 2) Tidak memiliki tanda pengenal atau identitas diri. Berperilaku bebas/liar, terlepas dari norma-norma kehidupan masyarakat pada umumnya.
- 3) Tidak memiliki pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas dan lain-lain.

Murdianto (2012:17) juga mengemukakan ciri-ciri dari gelandangan yaitu sebagai berikut :

1. Anak sampai usia dewasa tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.
2. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya
3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan, barang bekas dan sebagainya.

2.2.4 Karakteristik Pengemis dan Gelandangan

Dimas (2013 : 1) Karakteristik dari pengemis dan gelandangan adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik pengemis
 - a. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
 - b. Meminta-minta dirumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, lampu lalu lintas, rumah makan dan tempat lainnya.
 - c. Meminta-minta dirumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, lampu lalu lintas, rumah makan dan tempat lainnya.

d. Berperilaku meminta belas kasihan, berpura-pura sakit

2. Karakteristik Gelandangan

1. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara dan menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.
2. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku bebas dan liar, terlepas dari norma masyarakat pada umumnya.
3. Tidak mempunyai pekerjaan, meminta-minta bahkan mengorek tempat pembuangan makanan sisa.

Dimas (2013 : 1-5) menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan sebagai pengemis dan gelandangan yaitu :

1. Malas berusaha

Kegiatan mengemis dan gelandangan dengan minta-minta agar mendapat uang dari orang lain dengan mudah tanpa harus bersusah payah membuat orang-orang tersebut malas untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.

2. Disabilitas fisik/cacat fisik

Dengan keterbatasan fisik membuat orang menjadi pasrah, minder dan tidak dapat melangsungkan hidupnya, dari pemikiran pasrah sehingga membuat orang-orang memilih untuk menjadi pengemis dan gelandangan.

3. Tidak adanya lapangan pekerjaan

Orang yang minim akan kemampuan akademis dan kurangnya ilmu yang mereka miliki yang mendorong orang dalam mengambil langkah yang salah dan menjadikan pekerjaan meminta-minta sebagai pekerjaan tetap yang dilakukan setiap hari.

4. Harga kebutuhan pokok yang mahal

Dengan melambung tingginya harga kebutuhan pokok membuat sebagian orang kebingungan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka berpikir tidak ada cara lain selain meminta-minta.

5. Disuruh orang tua

Saat ini banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya sehingga anak-anak dipaksa untuk meminta-minta di lampu merah dan tempat umum lainnya, besar kemungkinan masyarakat akan iba kepada anak-anak dan lebih bersimpati kepada kisah anak-anak tersebut.

6. Kemiskinan

Faktor ekonomi yang sudah tidak bisa ditanggulangi yang menyebabkan orang-orang hidup dengan keterbatasan ekonomi membuat Orang-orang mengambil pilihan menjadi pengemis dan gelandangan untuk bertahan hidup.

2.3 Program Skill Development Center

Program *Skill Development Center* merupakan program dari sebuah wadah atau forum yang dibentuk oleh, dari dan untuk kepentingan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka melakukan pembinaan dan mengatasi

permasalahan agar yang mengikuti program bisa meemiliki kemampuan dalam bidang tenaga kerja.

Program *Skill Development Center* ini adalah sebagai peningkatan kerja sama antara Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan Industri dalam peningkatan keahlian tenaga kerja sesuai keperluan pasar kerja disetia daerah, serta sebagai salah satu program yang diusung oleh BAPPENAS sebagai salah satu respon terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yaitu Inpres Nomor 9 Tahun 2016 yang mana untuk merevitalisasi pendidikan dan pelatihan Vokasi.

Tommy Suprpto (2009:135) mendefinisikan skill adalah kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan kedalam praktik sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan.

Development adalah kegiatan pengembangan yang memiliki fokus jangka panjang untuk mempersiapkan tenaga pada tanggung jawab pekerjaan dimasa depan, juga meningkatkan kapasitas dalam melakukan pekerjaan (Werner dan Desimone 2011:10)

Adapun Unsur-unsur dalam pembinaan Gelandangan dan Pengemis melalui menurut Werner & Desimone (2011 : 12) yaitu sebagai berikut :

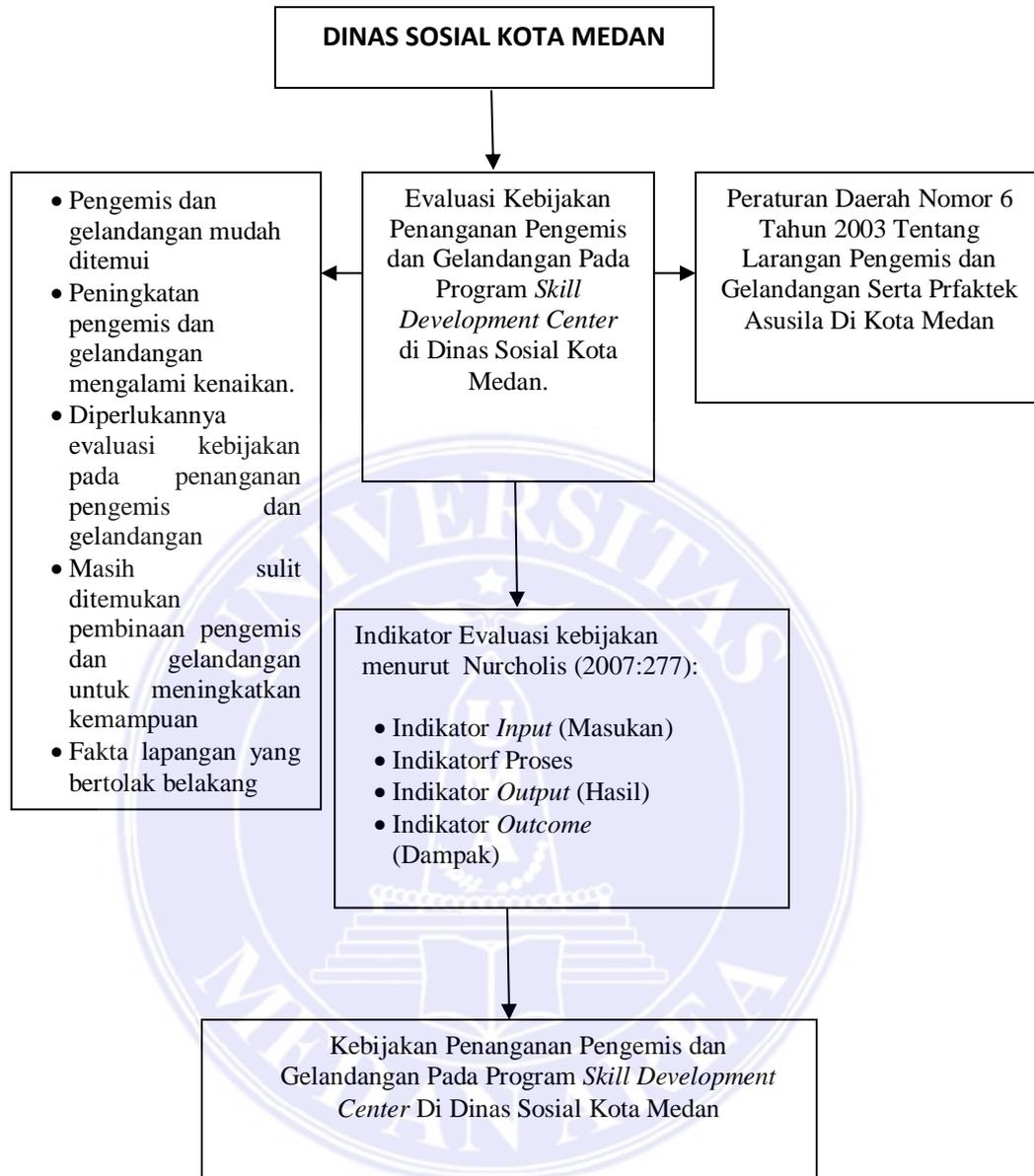
1. Pembinaan Karakter mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk merubah perilaku, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
2. Terdapat suatu proses bimbingan, pengarahan dan tindakan kepada yang dibina
3. Terdapat unsur manajerial (Perencanaan, Pengorganisasian, Pengawasan)
4. Output kualitas hasil lulusan yang diharapkan.

2.4 Kerangka Berpikir

Juliansyah (2011 : 251-252) menjelaskan bahwa kerangka pemikiran merupakan kerangka pikir yang menerangkan secara rinci hubungan antar variabel yang terlibat dalam penelitian, hubungan antara konsep dengan konsep lain dari masalah yang diteliti. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan untuk menjelaskan secara teoritis pertautan variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir merupakan salah satu bagian dari penelitian yang menggambarkan tentang pola pikir peneliti dengan menggabungkan teori atau konsep sebagai landasan atau acuan dengan fenomena yang akan diteliti.

Kerangka pemikiran didefinisikan sebagai rangkaian konsep yang jelas yang dibuat oleh peneliti. Dari analisis yang dijelaskan diatas, maka adapun kerangka penelitian tentang evaluasi kebijakan penanganan pengemis pada program *skill development center* di kota Medan yaitu sebagai berikut :

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Peneliti (2023).

Evaluasi kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan di Kota Medan pada dasarnya salah satu cara pemerintah untuk menciptakan kota yang bersih dan tertib dalam peraturfan Pemerintah Daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan Pengemis dan Gelandangan serta praktek Asusila di Kota Medan. Namun, Pada kenyataannya sampai saat ini permasalahan ini masih tetap ada dengan fakta masih bisa ditemuinya pengemis dan gelandangan di setiap tempat.

Untuk mengukur hasil tujuan kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan di Kota Medan perlu adanya Indikator ukuran hasil kebijakan . Indikator Evaluasi Kebijakan yang peneliti terapkan dalam penelitian ini yaitu indikator evaluasi kebijakan menurut Nurcholis (2007:277) yaitu, Indikator *Input*, Indikator Proses, Indikator *Output*, Indikator *Outcome*. Dengan Tujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan di kota Medan serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan di kota Medan.



2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun /Sumber	Judul	Uraian	Hasil
1.	Aulia Agustina /2021 / Jurnal Mahasiswa Uma	Evaluasi Penanganan Pengemis di Kota Medan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)	<ul style="list-style-type: none"> • Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Penelitian kualitatif deskriptif • Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Nurcholis (2007:277). • Lokasi penelitian ini di Dinas Sosial Kota Medan. • Fokus penelitian ini hanya pada penanganan pengemis di Kota Medan 	Penelitian ini menggunakan teori Nurcholis (2007 :277) : Sumber daya manusia yang tersedia untuk penanganan pengemis memadai dengan jumlah pekerja sosial. Masih dibutuhkan kejelasan mekanisme untuk menyeleksi hasil dari penjangingan. Evaluasi penanganan pengemis masih terus dilakukan. Faktor yang menghambat dalam evaluasi penanganan pengemis yaitu rumah perlindungan sosial yang belum selesai dan faktor mental klien yang belum cukup memahami .
2	Effnuz Al-Anba/ 2020 /Jurnal Universitas Diponegoro	Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang No.5 Tahun 2014 Tentang penanganan Gelandangan, Anak jalanan, dan Pengemis di Kota Semarang)	<ul style="list-style-type: none"> • Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. • Teori yang digunakan untuk mengukur evaluasi penanganan gelandangandalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Nurcholis (2007 :277). • Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Semarang 	Sumber daya manusia dalam hasil penelitian sudah memenuhi dalam menangani masalah gelandangan, Aspek sarana dan prasarana masih kurang, dalam penelitian ini berdasarkan data benar telah diadakan sosialisasi, dalam hal mekanisme sudah ada namun perlu ditingkatkan

			<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian ini pada penanganan gelandangan dengan studi kasus peraturan daerah kota Semarang No. 5 tahun 2014. 	<p>lagi, pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang hanya sampai pada tahap pendampingan. Faktor yang menghambat dalam penanganan gelandangan, faktor waktu dimana waktu yang tidak sistematis membuat perencanaan kurang terkontrol, faktor kehati-hatian dimana melupakan nilai substansial dalam program.</p>
3	Yakobus Margilan / 2017 / Jurnal Tribuana Tunggaladewi	Evaluasi Implementasi Program penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis berdasarkan peraturan daerah kota Malang no. 9 tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. • Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Hamdi (2014 : 98) tiga indikator Evaluasi implementasi linearitas, produktivitas, efektifitas. • Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas sosial kota Malang. • Fokus penelitian ini yaitu pada evaluasi penanganan anak jalanan, pengemis, gelandangan berdasarkan peraturan daerah kota Malang no. 9 tahun 2013 	<p>Hasil penelitian ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linearitas dimana penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan di kota Malang sudah ditentukan dalam derajat kesesuaian diukur dalam rencana strategi masing-masing bidang. • Produktivitas dimana program kerjapenanganan sudah berjalan dengan baik mengikuti acuan rencana strategi kerja dinas sosial kota Malang. • Efektifitas dimana tingkat efisiensinya sudah mencapai sasaran dengan kriteria yang jelas. • Faktor penghambat dimana proses linearitas tidak dijalankan dengan

				semestinya. apabila implementasi program tidak sesuai jumlah derajat kesesuaian.
4	Surya Waldi / 2021/ Jurnal Universitas Sumatera Utara	Evaluasi kebijakan larangan Pengemis di kota Medan	<ul style="list-style-type: none"> • Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Deskriptif Kualitatif • Teori yang digunakan dalam penelitian menurut Nurcholis (2007 : 277) mengemukakan <i>Input, Proses, Output dan Outcome</i> • Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dinas sosial Kota medan • Fokus penelitian ini pada Evaluasi kebijakan larangan pengemis di Kota Medan. 	<p>Hasil Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia sudah tercukupi dengan baik ditambah dengan bantuan Satpol PP • Aspek sarana dan prasaran dimana hanya ada tempat penampungan sementara diakrenakan panti rehabilitasi belum tersedia karena tidakada kewenangan pembangunan panti rehabilitasi tingkat kota. • Sosialisasi sudah berjalan cukup baik dengan menemui secara langsung sasaran kebijakan. • Kejelasan mekanisme pelaksanaan larangan pengemis sudah terlaksana dengan baik. • sebelum pandemi penertiban dilakukan sebanyak 15 sebulan dan setelah pandemi dilakukan dua kali seminggu.
5	Putri Maulia /2020 / Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam	Evaluasi Penanganan Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi	<ul style="list-style-type: none"> • Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif deskriptif. 	<p>Hasil Penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dirumah singgal ada dua macam, yaitu pembinaan

		<p>Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori yang digunakan dalam penelitian ini dikemukakan oleh Brigman & Davis yaitu Indikator <i>Input, Process, Output, Outcome</i> • Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti ini terletak di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. • Fokus penelitian ini pada Evaluasi penanganan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. 	<p>mental dan pembinaan fisik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumah Singgah Kota Banda Aceh memiliki pekerja sosial, tentu bila ada pekerja sosial maka ia akan lebih berkompeten di bidangnya dimana memiliki kompetensi dalam penanganan masalah sosial daripada pegawai berlatar belakang. • Fasilitas yang sebenarnya sudah cukup mendukung namun terlihat sedikit tidak terurus padahal ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh rumah singgah kepada klien.
--	--	--	--	---

Perbedaan penelitian terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu : Pada lima penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, yang menjadi pembedanya pada fokus penelitian objeknya masing-masing berbeda dimana, penelitian pertama berfokus penanganan pengemis, penelitian penelitian kedua berfokus pada penanganan gelandangan dengan studi kasus peraturan daerah dan lokasi penelitian di kota Semarang, penelitian ketiga berfokus pada penanganan pengemis, anak jalanan, gelandangan berdasarkan peraturan daerah serta lokasi penelitian di kota Malang, penelitian keempat berfokus pada larangan pengemis, penelitian kelima berfokus pada pembinaan gelandangan dan pengemis dan lokasi penelitian di Kota Banda Aceh.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu : Pada 5 (lima) penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, untuk penelitian pertama dan penelitian keempat yang peneliti cantumkan dalam penelitian ini dilakukan di lokasi yang sama yaitu di Dinas Sosial Kota Medan, dalam hal mengevaluasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti memilih penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan atau fenomena yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik dan mendalam sesuai data dan fakta lapangan serta ingin mengetahui secara mendalam permasalahan yang akan di kaji pada penelitian ini.

Suyitno (2018:7) Metode penelitian Kualitatif Deskriptif merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memaknai dan memahami subyek serta memberikan semua gejala yang tampak dan memaknai apa yang ada di balik gejala (fenomena).

Sukmadinata (2017:72) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain.

Definisi menurut Arikunto (2019:3) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Bodgan dan Biklen (dalam Sugiyono, 2015: 21), secara umum penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Penelitian ini berfokus pada permasalahan yang diangkat dari data dan fakta-fakta dilapangan yang dilakukan dengan cara, pengamatan, wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi kita dalam melakukan penelitian serta memaparkan permasalahan yang diteliti.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2017 : 208) menjelaskan bahwa fokus penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari lapangan. Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti.

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik-topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator-

indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.

Fokus penelitian digunakan penulis untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar terstruktur dan tidak melenceng dari fokus utama. Fokuspeneliti yaitu pada Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengemis dan Gelandangan Pada Program *Skill Development Center* di Dinas Sosial Kota Medan. Evaluasi Kebijakan dilakukan berdasarkan Indikator Evaluasi kebijakan menurut Nurcholis (2007:277).

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dipercayakan dapat memberikan informasi atau dapat dikonfirmasi tentang hal yang berkaitan dengan masalah penelitian . Dalam penelitian ini informan dapat dikatakan sebagai pembantu peneliti yang menafsirkan sesuatu yang berkaitan dengan data kepada peneliti (Azwardi, 2018:31).

Informan Kunci memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa, secara terperinci disbanding orang lain, dan merupakan sumber data yang paling berharga bagi peneliti.

Afrizal (2016:139) mengemukakan bahwa Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau hal kepada peneliti secara mendalam. Dalam penelitian Kualitatif, Informan Penelitian dibagi menjadi 3 (tiga) bagian menurut Afrizal (2016:19) yaitu :

- a. Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan diteliti.

- b. Informan kunci adalah orang yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat peneliti.
- c. Informan tambahan merupakan orang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif.

Dalam mengumpulkan data yang akurat, maka peneliti memilih informan dengan menggunakan teknik *Purposive* dan *Snowball sampling*, di mana peneliti sudah menentukan siapa saja yang akan diwawancarai dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini yang dijadikan informan oleh peneliti dalam penelitian evaluasi kebijakan larangan pengemis di Kota Medan, antara lain:

Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian

No	Status Informan	Informasi yang dibutuhkan	Jenis Informan	Jumlah
1	Kepala Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan	Informasi tentang dampak yang ditimbulkan dari Evaluasi kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan di kota Medan terkait dengan <i>Input</i> , <i>Proses</i> , <i>output</i> dan <i>outcome</i>	Informan Utama	1

No	Status Informan	Informasi yang dibutuhkan	Jenis Informan	Jumlah
2	Koordinator URC dan staff rehabilitas sosial Dinas Sosial kota Medan	Informasi berupa data yang ada setiap pelaksanaan evaluasi yang berkaitan dengan larangan pengemis di Kota Medan terkait dengan <i>Input</i> , <i>Proses</i> , <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> .	Informan Utama	1
3	Kepala Seksi Komunikasi dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan	Informasi berupa kejelasan mekanisme dalam masukan untuk evaluasi kebijakan larangan pengemis di Kota Medan terkait dengan <i>Input</i> , <i>Proses</i> , <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> .	Informan Kunci	1
4	Sasaran Kebijakan (Para Pengemis)	Informasi tentang alasan melakukan kegiatan yang dilarang dalam kebijakan larangan pengemis di Kota Medan.	Informan Tambahan	3
5	Warga Masyarakat	Informasi terkait tanggapan tentang kebijakan larangan pengemis di Kota Medan.	Informan Tambahan	3
Jumlah				9

Alasan peneliti memilih informan penelitian seperti Kepala Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan, hal itu dikarenakan bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan memiliki informasi yang akurat terkait pengemis yang ada di Kota Medan baik itu dalam segi data maupun lapangan dalam melakukan penjarangan razia pengemis di Kota Medan. Untuk informan Koordinator URC, Staff Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota peneliti hanya memilih 1 dikarenakan Staff tersebut sebagai staff lapangan yang memimpin penjarangan razia

pengemis di Kota Medan sehingga banyak data dan informasi yang dimiliki, hal itulah yang membuat peneliti cukup dalam memilih 1 Staff Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan. Untuk informan berikutnya peneliti memilih Kepala Seksi Komunikasi dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan dikarenakan Dinas Sosial Kota Medan juga bekerjasama dengan Satpol PP dalam menjaring razia para pengemis di Kota Medan dan Kepala Seksi Komunikasi dan Kerjasama Satpol PP Kota Medan memiliki informasi yang akurat terkait pengemis di Kota Medan dan juga dapat menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan terkait kebijakan larangan pengemis di Kota Medan.

Untuk informan sasaran kebijakan yaitu para Pengemis, peneliti memilih 6 orang dikarenakan mereka terjaring razia dan pernah melakukan kegiatan mengemis di Kota Medan. Informan selanjutnya yaitu Masyarakat yang peneliti pilih sekitar 8 orang dikarenakan peneliti ingin mengetahui informasi dari masyarakat terkait keberadaan pengemis di Kota Medan seperti di Medan Sunggal, Medan Amplas, Medan Petisah, dan Medan Selayang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan teknik atau langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2017:137).

Teknik pengumpulan data di penelitian ini sebagai berikut :

a. *Interview* (Wawancara)

Menurut P. Joko Subagyo (2011:39) mengemukakan bahwa wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi

secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada reponden.

Wawancara adalah percakapan antar dua orang atau lebih yang terdiri dari pewawancara dan narasumber, tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dari narasumber terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang pewawancara tersebut dan narasumber dapat menjawab dengan fakta kejadian yang sebenarnya.

Menurut Nursapia (2020:78) mengemukakan bahwa wawancara merupakan salah satu pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.

b. *Observasi* (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan atau pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap unsure-unsur yang terlihat dalam suatu gejala pada objek penelitian (Widoyoko 2012:46).

Menurut Sugiyono (2017:310) mengemukakan Observasi merupakan pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala yang terjadi dilapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan,

keterangan, serta bukti dan juga menyebarkannya juga kepada pihak berkepentingan.

Sugiyono (2017:329) mengemukakan Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengetahui seluruh kondisi gudang dari lingkungan kerja, dan kebersihan ruang kerja.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketetapan dan kesahihan hasil penelitian (Muri Yusuf 2014:251).

Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai dilapangan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis data kualitatif yang melakukan analisis dengan cara menyeleksi data serta menyederhanakan sehingga mendapat hal penting dari data yang didapatkan, sehingga memberikan gambaran tentang Fakta yang sesuai dengan Evaluasi kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti model Miles dan Humberman (dalam Sugiyono 2017:246), yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, dengan reduksi yang artinya merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari pola dan tema. data yang telah direduksi akan memberikan gambaran memperjelas untuk peneliti sehingga peneliti mudah melakukan mendapatkan data selanjutnya. Peneliti dituntut untuk memiliki pola pikir yang luas terhadap fenomena yang eneliti sedang teliti.

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah mencari data dan informasi yang akan digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan yang terjadi dilapangan. Data yang dikumpulkan akan disusun dengan benar dalam bentuk naratif sehingga Data mudah dipahami dalam merencanakan kerja selanjutnya.

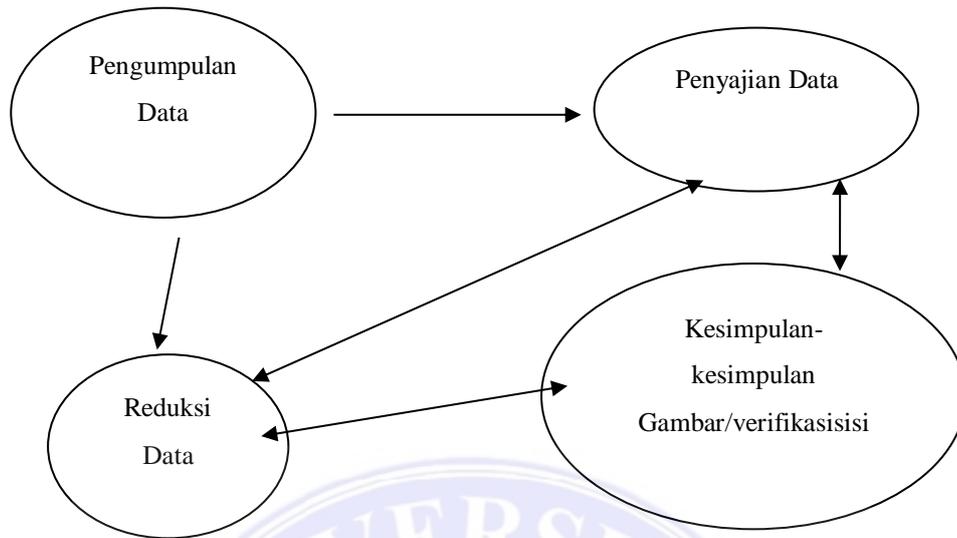
3. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data dikumpulkan dalah penyajian data. Penyajian data oleh peneliti dilakukan dalam bentuk naratif dalam laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agardapat dipahami dan dianalisis dengan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian dalam menyajikan data harus ada data dan informasi yang akurat agardata yang didapatkan tepat dan terpercaya.

4. Menarik Kesimpulan

Langkah akhir dalam penelitian adalah menarik kesimpulan, Menarik kesimpulan dapat diartikan sebagai argumentasi intisari dari hasil penelitian. Untuk menjelaskan apakah data yang diajukan dalam penelitian deskriptif kualitatif yang didukung oleh bukti-bukti valid dan jelas agar masyarakat bisa memahami apa yang terjadi disekitarnya.

Bagan 3.1 Model Teknik Analisis Data Miles dan Humberman



Sumber : Sugiyono (2017 : 276)

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melaksanakan penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Jl. Pinang Baris, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20217, Lokasi ini dipilih untuk mempermudah objek penelitian sebagai sasaran subyek peneliti tentang Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengemis dan Gelandangan Pada Program Skill Development Center Dinas Sosial Kota Medan, dengan adanya masalah sosial di masyarakat tentang pengemis dan gelandangan dapat digambarkan dengan jelas untuk mengurangi populasi mereka agar terwujud tatanan Kota Medan bersih dan tentram.

3.6.2 Jadwal Penelitian

Penelitian yang berjudul “Evaluasi kebijakan Penanganan Pengemis dan Gelandangan pada Program Skill Development Center Dinas Sosial Kota Medan” dimulai dengan pengajuan judul Bulan Oktober 2022.

Dalam penulisan skirpsi ini, penulis akan melaksanakannya secara bertahap hingga penelitian selesai. Berikut penulisan rincian penulisan:

No	URAIAN KEGIATAN	2022			2023								2025	
		10	11	12	01	02	03	04	05	10	11	12	01	04
1	Pengajuan Judul	■												
2	Bimbingan Proposal	■	■											
3	Sempro	■	■	■										
4	Penelitian	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
5	Semhas											■	■	
6	Perbaikan												■	■
7	Sidang													■

Tabel 3.2 Rincian Jadwal penelitian

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian selama berada dilapangan serta sejumlah pihak yang terkait dalam penelitian berjudul Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengemis dan Gelandangan pada Program *Skill Development Center* di Dinas Sosial Kota Medan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Evaluasi kebijakan sudah cukup baik dalam penanganan pengemis dan gelandangan di kota medan dari sisi dimensi *Input* yang di dalamnya sumber daya manusia dapat dikatakan sudah memenuhi, yang dimana para pekerja sosial yang bertugas memiliki pengalaman yang cukup, dalam penjangkaran Dinas Sosial Kota Medan juga dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Resort Kota Besar Medan, dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, serta lain sebagainya, Proses dari aspek kejelasan mekanisme sudah cukup baik mulai dari penertiban hingga sasaran kebijakan, Dari output aspek kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan kebijakan evaluasi penanganan sudah sesuai, ketepatan sasaran dalam penanganan ini adalah pengemis yang dilakukan dengan pendekatan dan pendataan terhadap para klien, outcome (Dampak) dari adanya penanganan terhadap pengemis memberikan dampak yang positif dan pelaksanaan program kebijakan sudah berdampak nyata yang dimana para klien pola pikirnya perlahan mulai membaik terhadap perbaikan dari evaluasi penanganan pengemis.

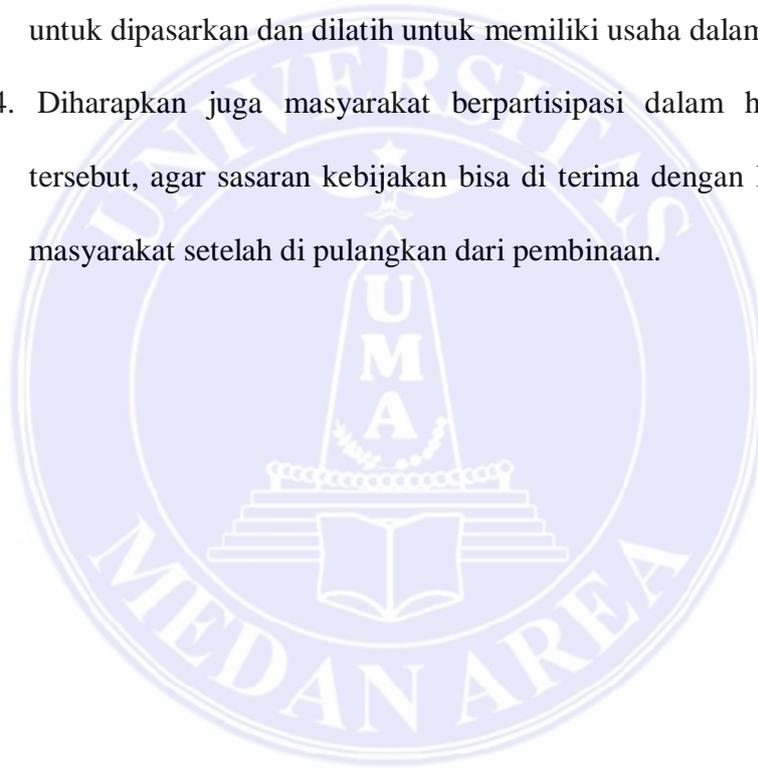
2. Dalam evaluasi kebijakan penanganan pengemis pada program *skill development center* yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan tentu memiliki beberapa faktor penghambat menurut Indikator dari teori yang digunakan yaitu seperti rumah perlindungan sosial yang belum dapat beroperasi sehingga para sasaran kebijakan yang terkena penjarangan dibawa ke upt binjai milik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk diberikan pembinaan, dan tentunya mental para klien yang pola fikir nya berbeda- beda yang membuat para pekerja sosial harus terus berupaya memberikan pelatihan mental di dalam upt agar pada saat selesai pembinaan mereka dapat beradaptasi di lingkungan masyarakat .

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengemis dan gelandangan pada Program *Skill Development Center* di Dinas Sosial kota Medan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dinas Sosial perlu untuk terus berupaya dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kebijakan penanganan pengemis, seperti halnya dalam menjalin hubungan yang baik antar satu holder dan para pekerja sosial, kebutuhan yang diperlukan sasaran kebijakan perlahan dapat terpenuhi, serta meningkatkan pembinaan mental yang lebih baik seperti perwiridan untuk para sasaran kebijakan yang laki-laki agar dapat menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih baik lagi antar sasaran kebijakan lainnya.

2. Dinas Sosial kota Medan diharapkan mampu berupaya dalam mengurangi atau memperbaiki faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, agar pelaksanaan evaluasi kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan, berjalan dengan efektif dan efisien agar tujuan yang diharapkan tercapai dengan baik.
3. Dinas Sosial diharapkan mampu memberikan pelatihan untuk pembuatan kreativitas seperti pembuatan craft yang bisa menjadi daya tarik usaha untuk dipasarkan dan dilatih untuk memiliki usaha dalam bidang craft.
4. Diharapkan juga masyarakat berpartisipasi dalam hal penanganan tersebut, agar sasaran kebijakan bisa di terima dengan layak di tengah masyarakat setelah di pulangkan dari pembinaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alie Yafie 1986. *Islam dan Problema Kemiskinan*, Jakarta: pesantren P3M
- Anggara Sahya Anggara, 2018, *Kebijakan Publik*, CV Pustaka Setia : Bandung
- Arifin, Z. 2010. *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Benjamin., Tasman., & Abdul. 2017. *Pengembangan Sumber Daya Manusia:Teori, Dimensi, Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*.Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Dimas Dwi Irawan, 2013, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher : Jakarta
- Dr. Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana
- Drs. Indra Muda, M.B. 2019. *Analisis Kebijakan Publik*. Medan : Media Persada
- Farida, Y.T. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Firyal Akbar, Muhammad. 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan*. Gorontalo : Ideas Publishing
- Handoko T Hani. 2003. *Manajemen*. Edisi Ke II. Yogyakarta: BPFE
- Hayat, 2018. *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*, Malang : Intrans Publishing:
- M ahsun, M uhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: ffffffffPenerbit BPFE.
- Mardikanto & Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Murdiyanto, 2012. *Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Daerah Tertinggal*. Yogyakarta : B2P3KS
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. 2007. *Teori Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo
- Otto, Jan Michael. 2012. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi kebijakan Publik*.Surakarta : UNISRI Press
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sukmadinata, N.S. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Stufflebeam, D.L. & Chris L.S. Coryn, 2014. *Evaluation Theory, Models, and Application*. Second Edition, San Fransisco, CA: Jossey-Bass.
- Suprpto, T. 2009. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta : Medpress
- Sutrisno, Edy. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: KENCANA
- Suyitno, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tulung Agung : Akademia Pustaka

- Syani, Abdul. 2011. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tursilarini, Teteki Yoga dkk. 2009. *Kajian Model Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*. Yogyakarta: Citra Media
- Widoyoko, E.P. 2012. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Winarno, B. 2013. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS



Skripsi/Tesis/Jurnal

- Abdullah., Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik: Universitas Garut. Vol. 11, No.01 :1-12
- Anggriana, T.M & Dewi, N.K. 2016. *Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di UPT Rehabilitasi Sosial 31 Gelandangan Dan Pengemis*. INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 7 No. 1. Madiun
- Agustina, A. 2022. Evaluasi Penanganan Pengemis di Kota Medan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan). *Jurnal mahasiswa Uma*. 1-62
- Al-Anba, E. 2020. Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang No.5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan, Anak jalanan, dan Pengemis di Kota Semarang). *Jurnal Universitas Diponegoro*. 1-10
- Bryan Novedion 2016, Upaya Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh *Camp Assesment* Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, SKRIPSI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal 16
- Herdiana, Dian. 2018. *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik : STIA Cimahi. Vol. 01, No.03 :13-26.
- Margilan, Y. 2017. Evaluasi Implementasi Program Penanganan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013. *Jurnal Tribhuana Tungadewi*. 1-65
- Rosalina, Iga. 2012. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat. Vol. 01, No. 01 : 3.
- Waldi, S. 2021. Evaluasi Kebijakan Larangan Pengemis di Kota Medan. *Jurnal Universitas Sumatera Utara*. 1-203

Regulasi

- Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) Tentang Fakir Miskin dan Anak terlantar
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan gelandangan dan pengemis
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik asusila di Kota Medan
- Impres Nomor 9 Tahun 2016 Revitalisasi Dalam Rangka peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

Media lainnya

- Bappenas. 2009. *Pedoman Evaluasi dan Indikator Kinerja Pembangunan*. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan
- Jogjaprov. *Jenis-jenis PMKS-Dinas Sosial*. Diakses Pada tanggal 06 Oktober 2022
- Orbit Digital, *Kadinsos Medan : Pengemis, Manusia silver, anak jalanan berasal dari luar kota*. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022
- RMOL SUMUT, *Pengemis masih banyak dilampu merah*. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2022

Semarangkota. *Sudah Tidak mempan ditegur, 19 Orang pengemis, gelandangan dan anak jalanan terjaring penertiban*. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

Top Metro News, *DPRD Medan pertanyakan realisasi Program SDC*. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2022.

<https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS%20BAB%20III%2013416241020.pdf>

<http://eprints.stainkudus.ac.id/2458/5/5.%20BAB%20II.pdf>

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1335/5/141801018_file%205.pdf



LAMPIRAN PEDOMAN OBSERVASI

**EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN PENGEMIS DAN
GELANDANGAN PADA PROGRAM *SKILL DEVELOPMENT CENTER* DI
DINAS SOSIAL KOTA MEDAN**

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

No	Dimensi	Aspek Dimensi	Hasil Temua Lapangan	Jadwal Observasi
1	Input (Masukan)	Sumber Daya Manusia		
		Sarana dan Prasarana		
		Sosialisasi		
2	Proses	Kejelasan Mekanisme		
		Kepastian		
		Penertiban		
		Efektivitas		
3	Output (Hasil)	Kesesuaian Pelaksanaan dengan Tujuan Kebijakan		
		Ketepatan Sasaran		
		Kelompok yang		

No	Dimensi	Aspek Dimensi	Hasil Temua Lapangan	Jadwal Observasi
		Terlibat		
4	Outcome (Dampak)	Perubahan Kelompok Sasaran		
		Peningkatan Pelaksanaan		



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Panduan pertanyaan

Indikator Input

1. Apakah SDM dalam melakukan penertiban pengemis dan gelandangan sudah terpenuhi dengan baik ?
2. Bagaimana Kelengkapan sarana dan prasaranayang dimiliki Dinas Sosial Kota Medan ?
3. Bagaimana sosialisasi kepada sasaran kebijakan mengenai penanganan pengemis dan gelandangan di Kota medan ?
4. Apakah sosialisasi yang dilaksanakan berkaitan pada program *Skill Development Center* sudah terlaksana sesuai kebijakan ?

Indikator Proses

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Penertiban pengemis dan gelandangan ?
2. Bagaimana kepastian waktu penertiban pengemis dan gelandangan itu, berapa kali dalam satu bulan ?
3. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada para pengemis dan gelandangan yang terjarfing razia ?
4. Apakah penertiban yang Dinas Sosial lakukan untuk merazia pengemis dan gelandangan sudah efektif?

Indikator Output

1. Apakah pelaksanaan kebijkana sudah sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan ?
2. Apakah sasaran kebijakan sudah tepat dalam pelaksanaan penertibannya ?
3. Siapa saja kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan penanganan pengemis dan gelandangan ?

Indikator Outcome

1. Apakah setelah dilaksanakan penanganan pengemis dan gelandangan pada program *Skill development center* sasaran mengalami perubahan ?
2. Apakah pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan agar lebih efektif dari yang sebelumnya ?



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143
Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314
E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.brida.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0571

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 680/FIS.2/01.10/V/2023 Tanggal 08 Mei 2023 Perihal Pengambilan Data/Riset.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Permohonan Izin Riset Tugas Akhir kepada :

Nama : **Winarsih Analisis Zai**
NPM : 188520092
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Lokasi : Dinas Sosial Kota Medan
Judul : **"Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengemis dan Gelandangan Pada Program Skill Development Center di Dinas Sosial Kota Medan"**
Lamanya : 1 (satu) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 Mei 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN,



MANSURSYAH, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Arsip.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik darisatua Dokumen Elektronik darisatua hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

HASIL OBSERVASI

**EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN PENGEMIS DAN
GELANDANGAN PADA PROGRAM *SKILL DEVELOPMENT CENTER* DI
DINAS SOSIAL KOTA MEDAN**

Berikut adalah hasil observasi yang telah di dapatkan saat melakukan penelitian sebagai berikut :

No	Dimensi	Aspek Dimensi	Hasil Temua Lapangan	Jadwal Observasi
1	Input (Masukan)	Sumber Daya Manusia	SDM Dinas Sosial telah tercukupi dengan baik, pada saat turun lapangan berkoordinasi dengan personil Satpol PP yang membantu saat melakukan razia. Dinas Sosial selalu melakukan patrol atau pengawasan terhadap pengemis dan gelandangan setiap hari baik pagi, siang, dan malam hari.	Hasil observasi pada tanggal 29 Mei 2023 dan 30 Mei 2023
		Sarana dan Prasarana	Dinas sosial memiliki kekurangan yaitu belum memiliki panti rehabilitas sosial sendiri untuk melakukan pelatihan dan pembinaan para pengemis dan gelandangan yang terjaring razia.	
		Sosialisasi	Sosialisasi dari Dinas Sosial Dilakukan secara langsung kepada para pengemis dan gelandangan yang kedatanganmelakukan kegiatan mengemis dijalanan kota Medan.	
2	Proses	Kejelasan Mekanisme	Mekanisme sudah jelas, Dinas Sosial Kota Medan berkoordinasidengan lembaga lainnya untuk penertiban pengemis di Kota Medan dengan menentukan jam, hari, dan titik lokasi penertiban.	Hasil observasi pada tanggal 29 Mei 2023 dan 30 Mei 2023
		Kepastian	Penertibandilakukan sekitar 15 kali dalam sebulan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Sosial kota Medan setiap hari, yaitu pada Pagi hari, siang hari, dan malam hari.	
		Penertiban	Penertiban dilakukan hanya sebatasan teguran dan sosialiasai, tapi untuk sanksi belum dilakukan dan langsung	

No	Dimensi	Aspek Dimensi	Hasil Temua Lapangan	Jadwal Observasi
			diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pelatihan dan pembinaan	
		Efektivitas	Personil dari Dinas Sosial Kota Medan memiliki pengalaman dan hal itu menjadikan penertiban lebih efektif karena dapat mengatasi berbagai permasalahan saat penertiban contohnya saat pengemis kabur dapat dikejar dengan kereta Patrol	
3	Output (Hasil)	Kesesuaian Pelaksanaan dengan Tujuan Kebijakan	Masih belum sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan tentang Larangan Pengemis di Kota Medan, karena masih terdapat Pengemis di jalanan Kota Medan	
		Ketepatan Sasaran	Sudah tepat dengan sasaran kebijakan yaitu pengemis dan gelandangan	
		Kelompok yang Terlibat	Dinas Sosial kota Medan, Dinas Sosial Sumatera Utara, Satpol PP, LPAI, PKPA, Polrestabes.	
4	Outcome (Dampak)	Perubahan Kelompok Sasaran	Para Sasaran Kebijakan (Pengemis) mengetahui kalau Mengemis itu di Larang di Kota Medan dan Para Sasaran Kebijakan (Pengemis) tersebut lebih memilih bekerja di Ladang atau Kebun orang di karenakan saat di panti sudah di ajarkan cara mengelola atau bekerja di Ladang atau Kebun.	Hasil observasi pada tanggal 29 Mei 2023 dan 30 Mei 2023
		Peningkatan Pelaksanaan	Dinas Sosial terus meningkatkan pelaksanaan dengan memakai truk pengangkut pengemis yang jauh lebih efektif daripada hanya memakai mobil patrol. Peningkatan pengalaman petugas patroli menjadi lebih berguna untuk mengatasi jika ada permasalahan saat melakukan penertiban	

HASIL WAWANCARA
(KEPALA BIDANG REHABILITAS SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA
MEDAN)

A. Identitas Diri

Nama : Tuti Diana,SH
jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Wawancara : 29 Mei 2023
Alamat : Jl.Sei Alas No.56, Babura
Pekerjaan : Kepala Bidang Rehabilitas Sosial

B. Hasil wawancara

Indikator Input

1. Apakah SDM dalam melakukan penertiban pengemis dan gelandangan sudah terpenuhi dengan baik ?

Jawaban : Untuk SDM kita dari Dinas Sosial sudah terpenuhi dengan baik untuk pelaksanaan SDM sudah cukup untuk turun ke lapangan dalam penanganan pengemis dan gelandangan, yang nanti juga akan berkoordinasi dengan Satpol PP pada saat melakukan penertiban.

2. Bagaimana Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Sosial kota Medan ?

Jawaban : Kalau kelengkapan sarana dan prasarana kita Dinas Sosial sudah cukup lengkap ya, kita punya mobil untuk monitoring, kalau untuk truk pengangkut pengemis dan gelandangan kita ada satu truk, dan berkemungkinan meminta bantuan dari satpol PP dan berkoordinasi dengan mereka.

3. Apakah pelaksanaan sosialisasi kepada sasaran kebijakan sudah terlaksana dengan baik?

Jawaban : Kita melakukan sosialisasi pastinya sebelum melakukan penertiban pada pengemis dan gelandangan, dan sosialisasinya ya dari kami menunjukkan peraturan bahwa tidak boleh mengemis di daerah tersebut.

4. Apakah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berkaitan pada program *Skill Development Center* Sudah terlaksana?

Jawaban : Untuk sosialisasi dengan program *skill development center* belum ada ya dikarenakan kita yang masih terbatas pada prasarana sebelumnya.

Indikator Proses

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penertiban pengemis dan gelandangan ?

Jawaban : Pengkoordinasian dari kita dan Satpol PP dalam hal mekanisme dimana kita akan melakukan peninjauan, biasanya kita lakukan penggabungan yang dilakukan pagi hari, siang hari, dan malam hari dan itu rutin kita lakukan setiap hari tidak membatasi hari kerja dengan melakukan pengimbauan kepada mereka.

2. Bagaimana Kepastian Waktu penertiban pengemis dan gelandangan sudah terlaksana dengan baik ?

Jawaban : Kita melakukan patrol atau pengimbauan setiap hari mulai pagi, siang dan malam hari, untuk penertiban dilakukan sekitar 15 kali dalam sebulan untuk mengurangi jumlah penemis dan gelandangan di Kota Medan ini.

3. Bagaimana Sanksi yang diberikan kepada para pengemis dan gelandangan yang terjaring razia?

Jawaban : Kalau sanksi ya belum ada yang membuat mereka jera, kita hanya melakukan tugas kita, begitu kita lakukan penertiban ya kita langsung data terus bawa kerumah singgah dulu kemudian baru kita antar ke panti rehabilitasi milik Dinsos Provinsi Sumatera Utara.

4. Apakah penertiban yang Dinas Sosial lakukan untuk merazia pengemis dan gelandangan sudah efektif ?

Jawaban : Sudah efektif, karena dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, data terkait pengemis juga sudah menurun, tapi ya kita harus terus kerja sama dengan satpol PP, Polrestabes untuk menertibkan.

Indikator Output

1. Apakah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan?

Jawaban : Kalau pelaksanaan yang kita lakukan tentunya sesuai dengan peraturan ya, tujuan kebijakan larangan gepeng itukan membuat kota

Medan bersih dari pemandangan pengemis ya, untuk saat ini kita terus memfokuskan untuk mengurangi populasi pengemis jadi sebisa mungkin mencapai tujuan ini.

2. Apakah sasaran kebijakan sudah tepat dalam pelaksanaan penertibannya ?

Jawaban : kalau keteatan sasaran sih ya sudah tepat akrena sasaran kita memang gepeng, ya pada saat melakukan razia kita melakukan penertiban sesuai dengan perintah.

3. Siapa saja kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan penanganan pengemis dan gelandangan ?

Jawaban : Yang paling terlibat Dinas Sosial kota Medan, kemudian Dinas sosial Prov Sumut, terus Satpol PP kota Medan, karena selain personil SDM kita juga butuh fasilitas kendaraan kayak truk penumpang dari satpol pp kota Medan, dan kita juga membutuhkan tempat penampungan atau panti rehabilitasi untuk pengemis yang dimiliki Dinas Sosial Prov Sumut.

Indikator Outcome

1. Apakah setelah dilaksanakan penanganan pengemis dangelandangan pada program *skill development center* sasaran mengalami perubahan ?

Jawaban : perubahan pasti ada ya, dapat kita lihat dari mereka yang mulai ada keterampilan yang diperoleh saat pembinaan itu dipergunakan.

2. Apakah pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan agar lebih efektif dari sebelumnya ?

Jawaban : Pelaksanaan penertiban pengemis yang kita lakukan di kota Medan itu sudah cukup baik karena kalau kita lihat data ada penurunan untuk pengemis, kita terus fokus untuk menjadikan kota Medan menjadikota yang tidak terkesan kumuh karena ada pengemis.

3. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan di kota Medan ?

Jawaban : Ya kalau untuk faktorya sih, masih pada sarana dan prasaran yang masih belum rampung atau selesai dimana rumah panti sosial yang kita rancang untuk menampung mereka setelah keluar dari panti rehabilitasi milik Dinas sosial Pemprov dan juga mereka ini memiliki rasa bebal dan memberontak, ya kita lihat mereka ini ada yang berubah dan ada

yang bebal dikarenakan mental malas dan acuh terhadap aturan mereka kembalilah melakukan kegiatan mengemis ini.



HASIL WAWANCARA

(KOORDINATOR URC DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)

A. Identitas Diri

Nama : Lamo Maylend Lumban Tobing
jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Wawancara : 29 Mei 2023
Alamat : Jl. Bayam Sumatera Utara, Kec. Medan Baru
Pekerjaan : Koordinator URC Dinas Sosial

B. Hasil wawancara

Indikator Input

1. Apakah SDM dalam melakukan penertiban pengemis dan gelandangan sudah terpenuhi dengan baik ?

Jawaban : SDM kita sudah cukup baik dalam pemenuhan standar yang diharapkan dalam penanganan ini dan juga sesuai kebutuhan cukup saat turun kelapangan dalam penanganan pengemis dan gelandangan, yang bisa dari 10-15 orang yang turun langsung ke lapangan.

2. Bagaimana Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Sosial kota Medan ?

Jawaban : Sarana dan prasarana yang digunakan kalau untuk menertibkan perlu truk untuk mengangkut pengemis dan gelandangan, kita memiliki mobil patrol dan truk mengangkut berkoordinasi dengan satpol PP untuk melakukan penertiban yang diperlukan saat razia dilakukan dan pada saat melakukan kontroling kita biasanya menggunakan mobil patrol dari Dinas.

3. Apakah pelaksanaan sosialisasi kepada sasaran kebijakan sudah terlaksana dengan baik?

Jawaban : Kalau sosialisasi kita biasanya hanya ya menghimbau langsung kemerekayang ada dilapangan berupa menegur dan memberitahukan peraturan yang melarang mereka beroperasi di sana.

4. Apakah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berkaitan pada program *Skill Development Center* Sudah terlaksana?

Jawaban : Untuk sosialisasi dengan program *skill development center* belum ada ya dikarenakan kita yang masih terbatas pada prasarana sebelumnya.

Masih terkendala kita dalam memfasilitasi dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut.

Indikator Proses

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penertiban pengemis dan gelandangan ?

Jawaban : Jelas ada ya koordinasi sama Satpol PP, karena kita juga perlu tenaga mereka dalam menertibkan, kita juga memerlukan truk pengangkut pengemis itu, ya intinya pasti ada koordinasi sama satpol PP, kita hubungi dulu mereka, terus kita tentukan hari dan jam penertiban, kemudian kita kerja bersama.

2. Bagaimana Kepastian Waktu penertiban pengemis dan gelandangan sudah terlaksana dengan baik ?

Jawaban : Untuk penertiban kita melakukan sekitar 15 kali dalam sebulan sesuai dengan yang disepakati dan juga untuk memaksimalkan waktu yang dipergunakan dalam penertiban pengemis dan gelandangan di kota Medan ini.

3. Bagaimana Sanksi yang diberikan kepada para pengemis dan gelandangan yang terjaring razia?

Jawaban : Adanya pengemis dan gelandangan mengganggu pengguna jalan di kota-kota terkhususnya inti kota yang membuat kota seperti kumuh dan tidak teratur sehingga kurang nyaman di pandang, nah, dari Perda Nomor 6 Tahun 2003 untuk mengatasi Medan lepas dari kesan kota kumuh.

4. Apakah penertiban yang Dinas Sosial lakukan untuk merazia pengemis dan gelandangan sudah efektif ?

Jawaban : Kalau dibilang efektif ya sudah efektif karena kita kan dibantu oleh teman-teman dari Satpol PP kemudian Polrestabes, Dinsos Prov Sumut, LPA dan lainnya yang menertibkan pengemis-pengemis itu, dinasehatin, kalau lari kita kejar pake kereta supaya mereka jera, kemudian kita rehabilitasi, kita fasilitasi, ya efektiflah.

Indikator Output

1. Apakah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan?

Jawaban : Kami Tidak muluk-muluk berharap sih, karena kalau kita bilang tujuan kebijakan itu kan supaya pengemis hilang dari kota Medan ini tapi itu jujur sulit dilakukan karena Medan ini salah satu kota besar, kemudian ibu kota Provinsi Sumatera Utara, ya pastilah pengemis selalu ada, ya intinya kita harus selalu fokus dalam menekan jumlah atau populasinya karena pengemis ini sudah tidak ada rasa malunya jadi kita harus lebih menekan lagi jumlahnya.

2. Apakah sasaran kebijakan sudah tepat dalam pelaksanaan penertibannya ?

Jawaban : Tentu tepat ya, pelaksanaan kita langsung menertibkan para Anak jalanan, gelandangan sama pengemis, kita bawa mereka ke pantirehabilitasi sehingga disana mereka dibina dan dilatih sekitar 3 bulanan, jadi untuk pelaksanaan penertiban sudah sesuai dengan sasaran kebijakan yang harus di tertibkan.

3. Siapa saja kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan penanganan pengemis dan gelandangan ?

Jawaban : Tentu aja Dinas Sosial kota Medan, Teman-teman dari Dinas Sosial Prov Sumut, teman-teman Satpol PP, terus teman-teman Polrestabes, LPAI dan PKPA.

Indikator Outcome

1. Apakah setelah dilaksanakan penanganan pengemis dangelandangan pada program *skill development center* sasaran mengalami perubahan ?

Jawaban : Perubahan pasti ada ya, nanti saat dibina mereka jadi lebih tau kalau perbuatan mengemis itu tidak boleh, kemudian nanti ada juga kita temukan bakat mereka kayak punya keterampilan tapi kita gk bisa bantu banyak, kita juga tidak memiliki dana untuk membantu mereka, palingan kalau mereka benar-benar ingin berusaha, mau jualan gitu kita bantu mengirimkan proposal ke Dinas UMKM tapi kadang mereka itu gak punya

KTP, gak punya KK jadi kita juga gak bisa bantu banyak karena kan harus memenuhi persyaratan administrasi sementara mereka tidak lengkap.

2. Apakah pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan agar lebih efektif dari sebelumnya ?

Jawaban : Kalau pelaksanaan penertiban pengemis dan gelandangan ini juga dikatakan lebih baik dari tahun sebelumnya dengan personil yang turun kelapangan sudah cukup baik pelaksanaannya.

3. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan penanganan pengemis dan gelandangan di kota Medan ?

Jawaban : Untuk faktor penghambatnya ya seperti tahun sebelumnya yaitu sarana dan prasarana kita dimana tempat penampungan atau Rumah Panti Sosial kita belum ada ya, jadi itulah yang membuat mereka kembali ketempat semula, faktor kedua yaitu mental pengemis dan gelandangan ini sudah cukup membuat pusing dikarenakan rasa malas dan tidak mau mengikuti aturan yang membuat mereka selalumengulang hal yang sam, mereka ini meskipun sudah dibinakan diarahkan tapi jiwa yang malas tadi pun membuat mereka kembali berulah.

HASIL WAWANCARA
(KEPALA SEKSI KOMUNIKASI DAN KERJASAMA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA MEDAN)

A. Identitas Diri

Nama : Taufik Hidayat, SE
jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Wawancara : 30 Mei 2023
Alamat : Jln. Veteran No. 123, Kec. Medan Kota
Pekerjaan : Kepala Seksi komunikasi dan kerjasama satuan
polisi pamong praja Kota Medan

B. Hasil Wawancara

1. Apakah SDM dalam melakukan penertiban penertiban sudah terenuhi dengan baik?

Jawaban : Kalau SDM tergantung perminta dari Dinsos, biasanya kalau gabungan dari Dinsos minta 10 orang, dan kita juga disediakan kereta patrolsama mobil pengangkut 1, jadi ada yang dikereta dimana saat ada gepeng yang lari bisa dikejar dengan kereta.

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penertiban pengemis?

Jawaban : Pastinya kalau ada koordinasi gabungan kita akan menentukan harinya kita memita dari Dinsos, berupa personil yang dibutuhkan saat koordinasi gabungan ini, kami akan bergerak jika ada pengemis dan gelandangan yang tidak mau imbau dan Dinsos memonitoring seluruh pergerakan yang dilakukan hari itu.

3. Bagaimana sosialisasi yang diberikan kepada para pengemis dan gelandangan ?

Jawaban : Sosialisasi dilakukan sebelum melakukan penertiban, dimanakita akan melakukan pendekatan mereka terlebih dahulu, dan melakukan sosialisasi bahwa tidak boleh melakukan kegiatan mengemis sesuai dengan Perda Nomor6 Tahun 2003, namun jika mereka tidak mengindahkan, maka kita akan melakukan tindakan penertiban.

4. Bagaimana kepastian waktu penertiban pengemis itu, berapa kali dalam satu bulan ?

Jawaban : Penertiban gepeng kita biasanya rutin setiap hari, pagi, siang, dan malam hari. Kalau gabungan itu biasanya seminggu 2 kali dan kita juga mengimbau kepada mereka untuk pulang dan tidak mengemis di daerah tersebut.

5. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada para pengemis yang terjaring razia?

Jawaban : Kalau sanksi dari kita gak ada ya, karena kan begitu ditertibkan langsung kita serahkan ke Dinsos. Mereka kan sebenarnya sudah hilang fungsi sosialnya, udah gak ada lagi malunya jadi mau dikasi sanksi yang bias pun gak mempan.

6. Apakah penertiban yang Satpol PP kota Medan lakukan untuk merazia pengemis sudah efektif

Jawaban : Bisa dikatakan sudah efektif dikarenakan kan danaya perubahan dari tahun ke tahun bisa kita lihat sendiri dengan adanya penurunan jumlah pengemis dan gelandangan.

7. Apakah sasaran kebijakan sudah tepat dalam pelaksanaan penertibannya?

Jawaban : Kalau untuk ketepatan sasaran sih ya, tepat karena sasaran kita memang gepeng ya, pada saat melakukan razia kita melakukan penertiban kepada gepeng sesuai dengan perintah.

8. Bagaimana pelaksanaan penertiban pengemis di kota Medan, apakah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dalam melakukan penertiban?

Jawaban : Kalau lebih baik ya jelas kita melakukan patrol menggunakan mobil untuk memudahkan pengejaran dan sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.

HASIL WAWANCARA (SASARAN KEBIJAKAN)

A. Identitas Diri

Nama : Suprianto Siahaan

jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal Wawancara : 02 Juni 2023

B. Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui kalau kegiatan mengemis itu dilarang di kota Medan ?

Jawaban : Iya kami tau kalau ada larangan mengemis, tapi ya bagaimana lagi karena kami tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki uang untuk membeli makanan dan tidak ada pekerjaan maka kami mengemis.

2. Apakah Bapak/Ibu Pernah mendapatkan teguran oleh Dinas Sosial kota Medan saat sedang melakukan kegiatan mengemis ?

Jawaban : Iya kami pernah ada teguran dari Dinas sosial , namun hanya teguran kami kembali melakukan mengemis untuk mencari makan.

3. Pada saat diberikan teguran oleh Dinas Sosial kota Medan , apakah Bapak/Ibu langsung bergegas pergi dan tidak mengemis atau tetap melanjutkan kegiatan mengemis itu ?

Jawaban : Kami pada saat diberika teguran kami langsung berpindah smenunggu petuga Dinas sosial itu pergi

4. Di Daerah mana Bapak/Ibu melakukan kegiatan mengemis?

Jawaban : Awalnya kami melakukan kegiatan mengemis ini di Katamso, saat ada patrol kami berpindah tempat, namun saat ada razia gabungan ya kami terjaring.

5. Berapa kali Bapak/Ibu melakukan kegiatan mengemis dan masuk panti rehabilitasi ?

Jawaban : Baru ini tertangkap karena tidak mempunyai tempat tinggal dan sempat dibawa ke panti rehabilitasi dan dipulangkan kembali untuk mencari peerjaan.

6. Apakah yang akan Bapak/Ibu lakukan sesudah keluar dari panti rehabilitasi ?

Jawaban : saya sih mau mencari pekerjaan supaya bisa makan dan mencari tempat tinggal yang layak. Di panti kami di bekali dengan pembinaan untuk usaha berladang dan hasil upah dikumpulin untuk biaya sekolah anak dan makan sehari-hari.

7. Apa yang membuat Bapak/Ibu melakukan kegiatan mengemis?

Jawaban : Kami tidak ada uang dan kesusahan mencari makan makanya kami mengemis.

8. Bagaimana penertiban yang dilakukan Dinas Sosial kota Medan saat mengkap Bapak/Ibu ?

Jawaban : Posisi kami saat itu sedang berada dipinggir jalan, namun tiba-tiba ada razia kami dibawa ke mobil pengangkut tanpa ngomong apa apa dan di bawa ke panti rehabilitas.

9. Apakah Bapak/Ibu sadar kalau melakukan kegiatan mengemis akan ditangkap oleh Dinas Sosial kota Medan ?

Jawaban : Ya, kami sadar karena sebelumnya kami sudah mendapatkan teguran dari Dinsos, namun ya kembali mengingat kondisi kami yang kesusahan mencari makan makanya kami nekat untuk mengemis.

HASIL WAWANCARA (SASARAN KEBIJAKAN)

A. Identitas Diri

Nama : Ratna Sari Tambun

jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Wawancara : 02 Juni 2023

B. Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui kalau kegiatan mengemis itu dilarang di kota Medan ?

Jawaban : kami tau kalau ada larangan mengemis, tapi ya bagaimana lagi karena kami tidak memiliki uang untuk membeli makanan dan tidak ada pekerjaan maka kami mengemis.

2. Apakah Bapak/Ibu Pernah mendapatkan teguran oleh Dinas Sosial kota Medan saat sedang melakukan kegiatan mengemis ?

Jawaban : Pernah ada teguran dari Dinas sosial , namun hanya teguran kami kembali melakukan mengemis untuk mencari makan.

3. Pada saat diberikan teguran oleh Dinas Sosial kota Medan , apakah Bapak/Ibu langsung bergegas pergi dan tidak mengemis atau tetap melanjutkan kegiatan mengemis itu ?

Jawaban : Kami pada saat diberika teguran kami langsung berpindah smenunggu petuga Dinas sosial itu pergi

4. Di Daerah mana Bapak/Ibu melakukan kegiatan mengemis?

Jawaban : kami melakukan kegiatan mengemis ini di Marelan lalu berpindah tempat ke lapangan merdeka, saat ada patrol kami berpindah tempat, namun saat ada razia gabungan ya kami terjaring.

5. Berapa kali Bapak/Ibu melakukan kegiatan mengemis dan masuk panti rehabilitasi ?

Jawaban : Saya dua kali tertangkap karena tidak mempunyai tempat tinggal dan sempat dibawa ke panti rehabilitasi dan dipulangkan kembali untuk mencari peerjaan, namun saya tidak mendapatkan dan tetap kesusahan maka saya nekat lagi mengulang mengemis.

6. Apakah yang akan Bapak/Ibu lakukan sesudah keluar dari panti rehabilitasi ?

Jawaban : Ya, usaha lah apalagi, ini kami ngumpulin uang lah terus sama biaya sekolah anak-anak ini, walaupun, rumah dan makan ditanggung ya kami ngumpulin terus menerus samapai mempunyai tabungan.

7. Apa yang membuat Bapak/Ibu melakukan kegiatan mengemis?

Jawaban : Kami tidak ada uang dan kesusahan mencari makan makanya kami mengemis.

8. Bagaimana penertiban yang dilakukan Dinas Sosial kota Medan saat mengkap Bapak/Ibu ?

Jawaban : kami saat itu sedang berada dipinggir jalan, namun tiba-tiba ada razia kami dibawa ke mobil pengangkut tanpa ngomong apa apa dan di bawa ke panti rehabilitas.

9. Apakah Bapak/Ibu sadar kalau melakukan kegiatan mengemis akan ditangkap oleh Dinas Sosial kota Medan ?

Jawaban : Ya, kami sadar karena sebelumnya kami sudah mendapatkan teguran dari Dinsos, namun ya kembali mengingat kondisi kami yang kesusahan mencari makan makanya kami nekat untuk mengemis.

HASIL WAWANCARA (SASARAN KEBIJAKAN)

A. Identitas Diri

Nama : Sari Amelia Tambunan

jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Wawancara : 02 Juni 2023

B. Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui kalau kegiatan mengemis itu dilarang di kota Medan ?

Jawaban : Iya kami tau kalau ada larangan mengemis, tapi ya bagaimana lagi karena kami tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki uang untuk membeli makanan dan tidak ada pekerjaan maka kami mengemis.

2. Apakah Bapak/Ibu Pernah mendapatkan teguran oleh Dinas Sosial kota Medan saat sedang melakukan kegiatan mengemis ?

Jawaban : Iya kami pernah ada teguran dari Dinas sosial , namun hanya teguran kami kembali melakukan mengemis untuk mencari makan.

3. Pada saat diberikan teguran oleh Dinas Sosial kota Medan , apakah Bapak/Ibu langsung bergegas pergi dan tidak mengemis atau tetap melanjutkan kegiatan mengemis itu ?

Jawaban : Kami pada saat diberika teguran kami langsung berpindah smenunggu petuga Dinas sosial itu pergi

4. Di Daerah mana Bapak/Ibu melakukan kegiatan mengemis?

Jawaban : Awalnya kami melakukan kegiatan mengemis ini di Katamso, saat ada patrol kami berpindah tempat, namun saat ada razia gabungan ya kami terjaring.

5. Berapa kali Bapak/Ibu melakukan kegiatan mengemis dan masuk panti rehabilitasi ?

Jawaban : Baru ini tertangkap karena tidak mempunyai tempat tinggal dan sempat dibawa ke panti rehabilitasi dan dipulangkan kembali untuk mencari peerjaan.

6. Apakah yang akan Bapak/Ibu lakukan sesudah keluar dari panti rehablitasi ?

Jawaban : saya sih mau mencari pekerjaan supaya bisa makan dan mencari tempat tinggal yang layak. Di panti kami di bekali dengan pembinaan untuk usaha berladang dan hasil upah dikumpulin untuk biaya sekolah anak dan makan sehari-hari.

7. Apa yang membuat Bapak/Ibu melakukan kegiatan mengemis?

Jawaban : Kami tidak ada uang dan kesusahan mencari makan makanya kami mengemis.

8. Bagaimana penertiban yang dilakukan Dinas Sosial kota Medan saat mengkap Bapak/Ibu ?

Jawaban : Posisi kami saat itu sedang berada dipinggir jalan, namun tiba-tiba ada razia kami dibawa ke mobil pengangkut tanpa ngomong apa apa dan di bawa ke panti rehabilitas.

9. Apakah Bapak/Ibu sadar kalau melakukan kegiatan mengemis akan ditangkap oleh Dinas Sosial kota Medan ?

Jawaban : Ya, kami sadar karena sebelumnya kami sudah mendapatkan teguran dari Dinsos, namun ya kembali mengingat kondisi kami yang kesusahan mencari makan makanya kami nekat untuk mengemis.

HASIL WAWANCARA (MASYARAKAT)

A. Identitas Diri

Nama : Ayu Wandari
jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Wawancara : 22 Mei 2023
Alamat : Jln. Jamin Ginting No.56
Pekerjaan : Pegawai Konter Hp

B. Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kalau kegiatan mengemis itu di larang di kota Medan?

Jawaban : Saya tau sih, Cuma dengar dan pernah melihat juga pas petugas satpol itu melakukan razia yang bertepatan lewat depan saya singgah kemarin itu.

2. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat pengemis di Sekitaran Medan ini ?

Jawaban : Saya selalu melihat, ada yang di lampu merah, bahkan pinggir jalan pun saya pernah lihat yang kearah plaza medan fair mereka ada disitu.

3. Apakah orang yang mengemis itu mengganggu pemandangan di Kota ?

Jawaban : Kalau menurut saya sih iya sangat mengganggu, apalagi kalau di lampu merah mereka kadang bikin jalanan terganggu dengan posisi yang seharusnya kereta lewat mereka nongkrong disitu.

4. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat Penertiban yang dilakukan Dinas Sosial kota Medan dalam menertibkan para pengemis ?

Jawaban : Kalau secara langsung penertibannya sih belum seluruh, Cuma ya saya melihat ada nya mobil-mobil dari satpol pp dan Dinsos begitu lewat .

5. Apakah sanksi yang bagus menurut Bapak/Ibu yang dapat membuat pengemis dan gelandangan jera ?

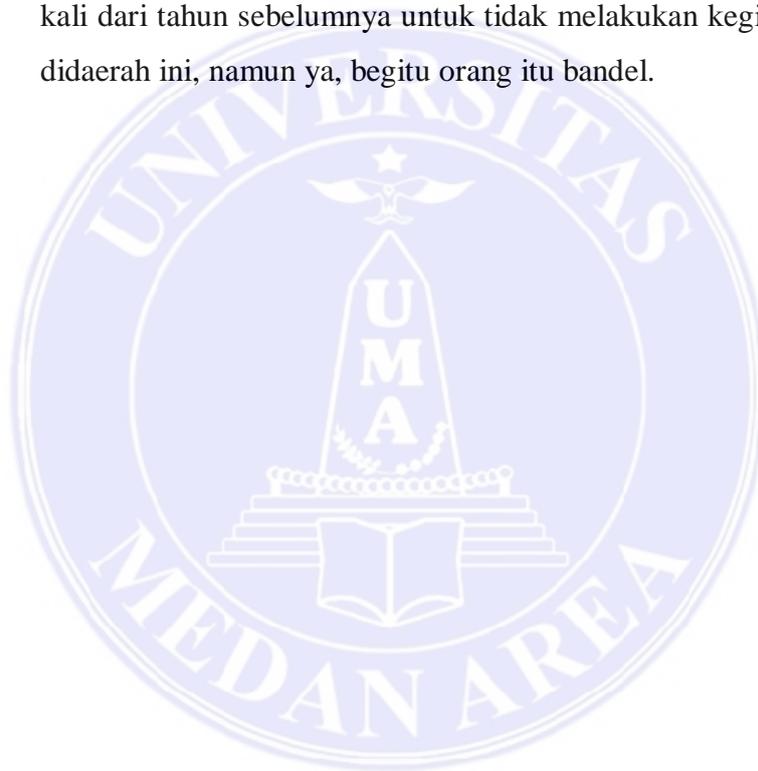
Jawaban : Kalau sanksi sih kurang tau ya, yang saya dengar orang itu ditangkap dan di masukkan ke rumah rehabilitas, gitu aja.

6. Apakah Bapak/Ibu pernah menemukan pengemis dan gelandangan yang meminta-minta dengan paksa ?

Jawaban : Kalau secara langsung sih enggak, ya Cuma saya pernah merasakan kalau mereka itu agak bebal ya pas di lampu merah mnunggu jalan mereka menghampiri dan terus menunggu walau sudah ditolak.

7. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat Dinas Sosial Kota Medan melakukan sosialisasi terkait larangan pengemis di kota Medan ?

Jawaban : Saya pernah dengar pada saat razia pengemis dan gelandangan bahwa pengemis itu pernah dilarang atau ditegur berkali-kali dari tahun sebelumnya untuk tidak melakukan kegiatan mengemis didaerah ini, namun ya, begitu orang itu bandel.



HASIL WAWANCARA (MASYARAKAT)

A. Identitas Diri

Nama : Putra Seruan Hati Gulo
jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Wawancara : 23 Mei 2023
Alamat : Jln Pembangunan No.18, Medan Selayang
Pekerjaan : Pegawai PT. Dotri Gadai

B. Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kalau kegiatan mengemis itu di larang di kota Medan?

Jawaban : Setahuku mengemis emang di larang di mana-mana ya, karna kan itu kegiatan minta-minta tanpa buat apaapa gitu, terus mengemis kan buat gak nyaman kami sebagai pengendara kalau lagi di lampu merah, tiba-tiba datang aja pengemis itu, padahal ada yang masih sehat, seharusnya sih bisa bekerja tanpa harus minta minta ya

2. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat pengemis di Sekitaran Medan ini ?

Jawaban : Saya sering melihat sih yang begituan di Jl. Gatot Subroto dan sering juga melihat manusia Silver disana.

3. Apakah orang yang mengemis itu mengganggu pemandangan di Kota ?

Jawaban : Kalau menurut saya sih iya sangat mengganggu, apalagi kalau di lampu merah mereka kadang bikin jalanan terganggu dengan posisi yang seharusnya kereta lewat mereka nongkrong disitu.

4. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat Penertiban yang dilakukan Dinas Sosial kota Medan dalam menertibkan para pengemis ?

Jawaban : Oh pernah saya melihat satpol pp menaikkan mereka ke dalam truk pengangkut yang entah saya tidak tau di bawa kemana, cukup banyak yang terjaring saat itu.

5. Apakah sanksi yang bagus menurut Bapak/Ibu yang dapat membuat pengemis dan gelandangan jera ?

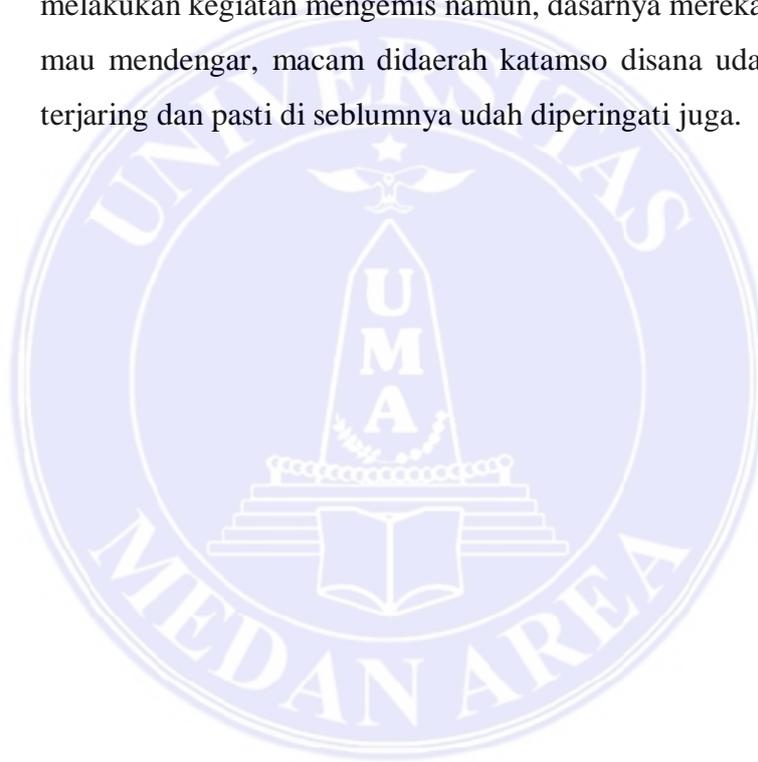
Jawaban : Kalau sanksi sih kurang tau ya, yang saya dengar orang itu ditangkap dan di masukkan ke rumah rehabilitas, gitu aja.

6. Apakah Bapak/Ibu pernah menemukan pengemis dan gelandangan yang meminta-minta dengan paksa ?

Jawaban : Kalau secara langsung sih enggak, ya kalau dilampu merah mereka menunggu di dekat sepeda motor yang ada di jalanan dan gak dikasi mereka akan pergi dengan wajah cemberut.

7. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat Dinas Sosial Kota Medan melakukan sosialisasi terkait larangan pengemis di kota Medan ?

Jawaban : Kalau pengemis ini pernah diperingati sebelumnya, dari tahun ke tahun mereka sudah tau adanya pemberitahuan tentang tidak melakukan kegiatan mengemis namun, dasarnya mereka bebal dan tidak mau mendengar, macam di daerah katamsu disana udah banyak yang terjaring dan pasti di seblumnya udah diperingati juga.



HASIL WAWANCARA (MASYARAKAT)

A. Identitas Diri

Nama : Mega Napitupulu
jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Wawancara : 23 Mei 2023
Alamat : Jl. Letda Soejono No.146
Pekerjaan : Pegawai Konter Hp

B. Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kalau kegiatan mengemis itu di larang di kota Medan?
Jawaban : Cuma dengar dan pernah melihat juga pas petugas satpol itu melakukan razia yang bertepatan lewat depan konter tempat kerja saya.
2. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat pengemis di Sekitaran Medan ini ?
Jawaban : Saya selalu melihat, ada yang di lampu merah, bahkan pinggir jalan pun saya pernah lihat yang daerah Helvetia sana ada mereka.
3. Apakah orang yang mengemis itu mengganggu pemandangan di Kota ?
Jawaban : iya sangat mengganggu, apalagi kalau di lampu merah mereka kadang bikin jalanan terganggu dengan posisi yang mereka menunggu di kasi uang .
4. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat Penertiban yang dilakukan Dinas Sosial kota Medan dalam menertibkan para pengemis ?
Jawaban : Kalau secara langsung penertibannya sih belum seluruh, Cuma ya saya melihat ada nya mobil-mobil dari satpol pp dan Dinsos begitu lewat .
5. Apakah sanksi yang bagus menurut Bapak/Ibu yang dapat membuat pengemis dan gelandangan jera ?
Jawaban : Kalau sanksi sih kurang tau ya, yang saya dengar orang itu ditangkap dan di masukkan ke rumah rehabilitas, gitu aja.
6. Apakah Bapak/Ibu pernah menemukan pengemis dan gelandangan yang meminta-minta dengan paksa ?

Jawaban : Kalau secara langsung sih enggak, ya Cuma saya pernah merasakan kalau mereka itu agak bebal ya pas di lampu merah mnunggu jalan mereka menghampiri dan terus menunggu walau sudah ditolak.

7. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat Dinas Sosial Kota Medan melakukan sosialisasi terkait larangan pengemis di kota Medan ?

Jawaban : Kalau didengar sih pernah melihat secara langsung tidak, dan pastinya kalau ada tindakan razia itu biasanya ada pemberitahuan dahulu kan sebelum ada aksi, ya mungkin begitu gak ada yang mendengar.



LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dokumentasi Bersama Ibu Tuti Diana, SH



Dokumentasi Kantor Dinas Sosial Kota Medan



Dokumentasi Dari Dinas Sosial Pelaksanaan Penertiban



Dokumentasi Pelaksanaan Razia PMKS bersama Satpol PP



Dokumentasi Panti Rehabilitas Sosial tempat Sasaran Kebijakan



Dokumentasi Lahan Perkebunan yang digunakan untuk para sasaran kebijakan



Dokumentasi dengan Pak Lamo Koordinator URC Dinas Sosial Kota Medan



Dokumentasi dengan Pak Taufik Satpol PP

